

**ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PESISIR DAN LAUT BERDASARKAN RTRW
DAN RZWP3K DI KECAMATAN BANYUWANGI
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh:

ISMI ISZHUL ISLAMIYA

NIM. H94218042

**PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ismi Iszhul Islamiya

NIM : H94218042

Program Studi : Ilmu Kelautan

Angkatan : 2018

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUT BERDASARKAN RTRW DAN RZWP3K DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI”**. Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Surabaya, 25 Oktober 2022

Yang menyatakan,



(Ismi Iszhul Islamiya)

NIM. H94218042

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh :

NAMA : ISMI ISZHULISLAMIYA

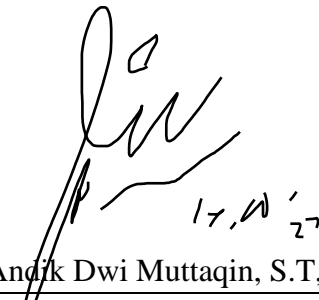
NIM : H94218042

JUDUL : ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH PESISIR DAN LAUT BERDASARKAN
RTRW DAN RZWP3K DI KECAMATAN
BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.


Surabaya, 14 Oktober 2022

Dosen Pembimbing 1



(Andik Dwi Muttaqin, S.T, M.T)
NIP. 198204102014031001

Dosen Pembimbing 2



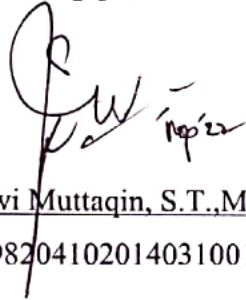
(Noverma M, Eng)
NIP. 198111182014032002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi Ismi Iszhul Islamiya ini telah dipertahankan
di depan tim penguji skripsi
di Surabaya, 25 Oktober 2022

Mengesahkan,
Dewan Penguji

Penguji I



(Andik Dwi Muttaqin, S.T., M.T.)

NIP. 198204102014031001

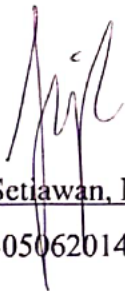
Penguji II



(Novernva, M. Eng.)

NIP. 198111182014032002

Penguji III



(Fajar Setiawan, M.T.)

NIP. 198405062014031001

Penguji IV



(Abdul Halim, S.Ag., M.HI.)

NIP. 197012082006041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Ampel Surabaya



NIP. 196507312000031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismi Iszhul Islamiya
NIM : H94218042
Fakultas/Jurusan : Sains dan Teknologi/Ilmu Kelautan
E-mail address : ismiszhul1006@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUT BERDASARKAN
RTRW DAN RZWP3K DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis

(Ismi Iszhul Islamiya)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Kecamatan Banyuwangi sebagai ibukota kabupaten akan mengambil peran menjadi pusat pertumbuhan, serta pelayanan wilayah kabupaten dengan adanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, gedung layanan pemerintah, serta pengembangan wilayah sebagai wilayah pesisir yang maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di kecamatan Banyuwangi, serta mengetahui kesesuaiannya terhadap RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yakni teknik klasifikasi citra model terbimbing dan ground check. Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi memiliki 8 kelas pemanfaatan dengan Pemukiman menjadi kelas pemanfaatan terluas yakni sebesar 1197 Ha, sedangkan kelas pemanfaatan terkecil yaitu pelabuhan dengan luas 16 Ha. Adapun pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi terdiri dari 6 zona yakni Lokasi Cemara dan Konservasi Penyu di Pantai Cemara, Pariwisata dan Pelabuhan Khusus di Pantai Pulau Santen, serta Lokasi Penyu dan Pelabuhan Lokal di Kawasan Pantai Boom. Kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir berdasarkan RTRW yang telah sesuai seluas 1883 Ha (70,9%), belum sesuai seluas 588 Ha (22,1%), dan lahan yang tidak sesuai seluas 185 Ha (7%). Sedangkan, pemanfaatan ruang laut terhadap RZWP-3-K 4 (empat) dari 6 (enam) zona pemanfaatan telah sesuai dengan dan 2 (dua) zona pemanfaatan lainnya belum sesuai. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali oleh pemerintah guna menentukan tindak lanjut terkait pemanfaatan ruang wilayah dan laut yang tidak sesuai perencanaan berdasarkan kebijakan yang ada.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Kesesuaian, RTRW, RZWP-3-K

ABSTRACT

Banyuwangi sub-district as the district capital will take on the role of being the center of growth, as well as serving the district area with the construction of government buildings, government service buildings, and regional development as an advanced coastal area. This study aims to determine the spatial use of coastal and marine areas in Banyuwangi sub-district, and to determine its suitability for the RTRW and RZWP-3-K. This study uses a quantitative descriptive method with data analysis techniques, namely guided model image classification techniques and ground checks. The results showed that the use of coastal area space in Banyuwangi District had 8 utilization classes with Settlement being the widest utilization class of 1197 Ha, while the smallest utilization class was the port with an area of 16 Ha. The utilization of marine space in Banyuwangi District consists of 6 zones, namely Cemara Locations and Turtle Conservation on Cemara Beach, Tourism and Special Ports on Santen Island Beach, as well as Turtle Locations and Local Harbors in the Boom Beach Area. The suitability of the spatial use of the coastal area based on the RTRW that has been appropriated is 1883 Ha (70.9%), not suitable for an area of 588 Ha (22.1%), and the unsuitable land area is 185 Ha (7%). Meanwhile, the utilization of marine space for RZWP-3-K 4 (four) of the 6 (six) utilization zones is in accordance with and 2 (two) other utilization zones are not. This shows the need for a review by the government to determine follow-up actions related to the use of territorial and marine space that is not in accordance with the planning based on existing policies.

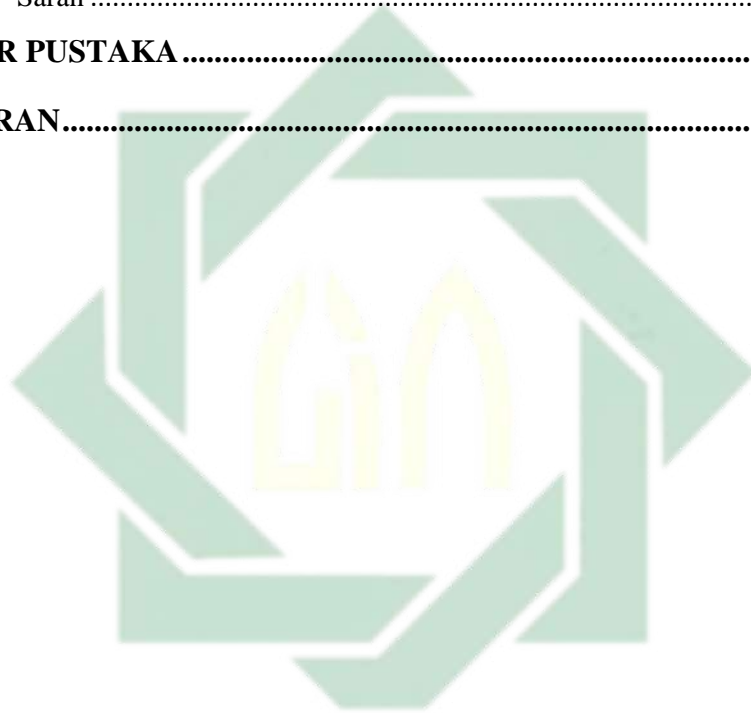
Keywords: *Utilization, Suitability, RTRW, RZWP-3-K*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Batasan Masalah	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Wilayah Pesisir	5
2.2. Tata Ruang	5
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	7
2.4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)	9
2.5. Sistem Informasi Geografis (SIG)	11
2.6. Citra Sentinel-2	14

2.7. Penelitian Terdahulu	14
2.8. Integrasi Keilmuan	20
BAB III.....	24
METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	24
3.2.1 Alat - alat	24
3.2.2 Bahan-bahan	25
3.3 Kerangka Penelitian	26
3.4 Prosedur Penelitian.....	27
3.4.1 Studi Literatur	27
3.4.2 Pengumpulan Data.....	28
a) Data Primer	28
b) Data Sekunder	28
3.4.3 Pengolahan Data	29
a) Pemanfaatan Ruang wilayah pesisir.....	29
b) Pemanfaatan Ruang Wilayah Laut.....	33
3.4.4 Analisis Data	35
3.5 Penyusunan Laporan	36
BAB IV	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1.Pemanfaatan Eksisting Ruang Wilayah Pesisir dan Laut di Kecamatan Banyuwangi ...	37
4.1.1. Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022	37
4.1.2. Pemanfaatan Ruang Laut Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022	46
4.2.Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K	47
4.2.1. Pola Ruang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012 - 2032.	47
4.2.2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir berdasarkan RTRW di Kecamatan Banyuwangi	50

4.2.3. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3- K) Kecamatan Banyuwangi Tahun 2018-2038	68
4.2.4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi	71
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Skematis Sistem Informasi Geografis	13
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian	24
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian	27
Gambar 4. Diagram Alir Pengolahan Data Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi	30
Gambar 5. Diagram Pengolahan Data Pemanfaatan Ruang Laut Kecamatan Banyuwangi	34
Gambar 6. Peta Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022	38
Gambar 7. Peta Ground Check Penggunaan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi	40
Gambar 8. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012-2032	48
Gambar 9. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting Berdasarkan RTRW di Kecamatan Banyuwangi	51
Gambar 10. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Pertanian	55
Gambar 11. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Perkebunan	57
Gambar 12. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Pertanian	58
Gambar 13. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Tambak	61
Gambar 14. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Perairan Payau	63
Gambar 15. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Tanah Ladang	64
Gambar 16. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Pelabuhan	66

Gambar 17. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Sempadan Pantai	67
Gambar 18. Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2018-2038	69
Gambar 19. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi	72
Gambar 20. Gambar 13. Zona Pemanfaatan ruang laut sebagai lokasi Cemara dan Konservasi Penyu	75
Gambar 21. Pulau Santen di Kecamatan Banyuwangi	76
Gambar 22. Pelabuhan Boom di Pantai Boom Kecamatan Banyuwangi	78
Gambar 23. Lampiran PERDA Kabupaten Banyuwangi No.08 Tahun 2012	87
Gambar 24. Lampiran PERDA No.08 Tahun 2012 Kabupaten Banyuwangi Mengenai perencanaan Kecamatan Sebagai PKW	88
Gambar 25. Lampiran Fungsi dan peranan Kawasan PKW dalam PERDA Kabupaten Banyuwangi No.08 Tahun 2012	89
Gambar 26. Lampiran Peta Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Jawa Timur	90
Gambar 27. Lampiran PERDA PROV. Jawa Timur No.01 Tahun 2018	91
Gambar 28. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada BAPPEDA Kab. Banyuwangi	92
Gambar 29. Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada DKP Jawa Timur	93
Gambar 30. Lampiran Surat Rekomendasi Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Satu Kab. Banyuwangi	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik spectrum panjang gelombang dan resolusi spasial masing-masing saluran Sentinel-2	14
Tabel 2. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian	25
Tabel 3. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian	25
Tabel 4. Luas pemanfaatan ruang wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi	39
Tabel 5. Hasil Ground Check peta pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Eksisting di Kecamatan Banyuwangi	40

Table 6. Zona Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Kecamatan Banyuwangi tahun 2022.....	47
Tabel 7. Luas rencana tata ruang wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW.....	49
Tabel 8. analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.....	52
Tabel 9. Luas Total Kesesuaian Pemanfaatn Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi	53
Tabel 10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Permukiman	56
Tabel 11. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Perkebunan.....	57
Tabel 12. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Pertanian	59
Tabel 13. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Kawasan Tambak.....	60
Tabel 14. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Kawasan Perairan Payau .	62
Tabel 15. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Tanah Ladang.....	63
Tabel 16. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Pelabuhan Yacht	65
Tabel 17. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Kawasan Sempadan Pantai.....	67
Table 18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kecamatan Banyuwangi	70
Tabel 19. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi	73
Table 20. Analisis kesesuaian Pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan konservasi penyu dan lokasi cemara berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi	74
Table 21. Analisis kesesuaian Pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan Pariwisata dan Pelabuhan Khusus berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi	76
Table 22. Analisis kesesuaian Pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan Pelabuhan Lokal dan Lokasi Penyu berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan wilayah pesisir yang luas. Wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki total luas wilayah yang lebih besar dari pulau Bali yakni sebesar 5.782,50 km², hal ini menjadikan Kabupaten Banyuwangi menjadi kabupaten terluas di pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 kecamatan dan 11 kecamatan diantaranya termasuk kedalam wilayah pesisir, salah satunya yaitu Kecamatan Banyuwangi (Sukandar et al., 2016). Masyarakat Banyuwangi umumnya menyebut Kecamatan Banyuwangi sebagai kota Banyuwangi, hal ini dikarenakan Kecamatan Banyuwangi merupakan ibukota dari kabupaten Banyuwangi.

Kecamatan Banyuwangi sebagai ibukota kabupaten akan mengambil peran menjadi pusat pertumbuhan, serta pelayanan wilayah kabupaten dengan adanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, gedung layanan pemerintah, serta pengembangan wilayah sebagai wilayah pesisir yang maju. Hal ini dapat dilihat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan kota Banyuwangi sebagai daerah pusat kegiatan wilayah (PKW) (PERDA NOMOR 08 TAHUN, 2012). Dimana segala pelayanan serta pertumbuhan wilayah kabupaten di pusatkan di kecamatan Banyuwangi. Perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) kabupaten Banyuwangi telah disusun dengan menimbangkan segala aspek yang dapat merugikan wilayah pesisir di kabupaten Banyuwangi. Wilayah pesisir merupakan penyatuan dari beberapa bagian ekologi serta fisik yang saling mempengaruhi dan berkaitan sehingga secara ekologis wilayah pesisir sangat rapuh. Oleh karenanya, pembangunan wilayah pesisir yang tidak memperhatikan kondisi ekologi akan sangat mengganggu fungsi ekologi di wilayah pesisir (Djunaedi & Basuki, 2002).

Berdasarkan RZWP3K Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2038 beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi masuk kedalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PERDA JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN, 2018). beberapa rencana zonasi di wilayah kabupaten Banyuwangi yakni (1) zona pariwisata meliputi Bangsring, Pulau Tabuhan, Pantai Boom, konservasi penyu, Pantai Pulau Merah, Green Bay, Pantai Pancur, serta Pantai Plengkung; (2) Zona Pelabuhan Meliputi DLKr dan DLKp Pelabuhan Tanjung Wangi, DLKr dan DLKp Pelabuhan Boom, serta WKOPP Pelabuhan Muncar dan Pelabuhan Pancer; (3) Zona Perikanan Tangkap; (4) Kawasan Konservasi meliputi wilayah KKP-3-K (Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dan KKP (Kawasan Konservasi Perairan); (5) Kawasan Strategis Nasional (KSN) yakni sebagai daerah latihan KRI TNI AL di Perairan Kabupaten Banyuwangi; (6) Alur Laut meliputi Alur Pelayaran dan Perlintasan, area pipa dan kabel bawah laut (Kabel listrik dan Kabel telekomunikasi), serta alur migrasi biota laut yakni migrasi biota tertentu maupun migrasi penyu. Kecamatan Banyuwangi menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang masuk kedalam wilayah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kecamatan Banyuwangi merupakan wilayah pesisir di kabupaten Banyuwangi yang memiliki banyak kekayaan sumberdaya alam, ada banyak pantai yang dimanfaatkan menjadi objek wisata di Kecamatan Banyuwangi. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi tentunya harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. maka dari itu pentingnya mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW dan RZWP3K, hal ini guna memastikan bahwa pemanfaatan ruang wilayah dan laut di Kecamatan Banyuwangi tidak merusak ekologi yang ada di wilayah ini. Topik penelitian ini telah banyak dilakukan di beberapa wilayah yang berbeda, akan tetapi dengan adanya perbedaan kondisi topografi wilayah, karakteristik wilayah, serta karakteristik masyarakat pada setiap wilayah tentunya akan memberikan informasi baru dan berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan utama yang dapat dirumuskan berdasarkan latarbelakng diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan Ruang wilayah pesisir dan laut eksisting di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terhadap RTRW dan RZWP3K?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut eksisting di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.
2. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terhadap RTRW dan RZWP3K.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP3K di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi terkait kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan RTRW dan RZWP3K, sehingga dapat dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pembangunan Kecamatan Banyuwangi.
2. Bagi masyarakat, penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi.
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai studi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perguruan tinggi.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi pengamatan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan RTRW dan RZWP3K pada penelitian ini hanya pada wilayah Kecamatan Banyuwangi.
2. Citra satelit yang digunakan pada penelitian ini adalah citra sentinel-2.
3. Penelitian ini menggunakan Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Banyuwangi tahun 2018-2038.
4. Penelitian ini menggunakan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032.
5. Penelitian ini menggunakan Peta Tematik Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Kabupaten Banyuwangi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wilayah Pesisir

Menurut (Fitri & Zulfa, 2018), Wilayah pesisir merupakan kawasan bertemunya daratan terluar dengan laut. Wilayah pesisir mempunyai potensi kekayaan hayati dan non hayati. Wilayah pesisir menuju laut meliputi wilayah laut yang tetap terpengaruh secara alami dan berlangsung di daratan seperti aliran air tawar dan sedimentasi, begitu pula dengan yang dipengaruhi aktivitas antropogenik seperti pencemaran. Sedangkan wilayah pesisir menuju daratan terdiri atas wilayah darat yang tidak ada air nya atau pun yang masih terendam dengan air dan masih dipengaruhi oleh karakteristik laut seperti, angin, arus, dan pasang surut. Wilayah pesisir terletak pada batas paling luar sepanjang 2 km dari garis pantai dan masih terpengaruh oleh angin, arus, dan pasang surut.

Wilayah pesisir terdapat aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir. Aktivitas tersebut diantaranya adalah budidaya perikanan, transportasi laut, industri, pertanian, penangkapan dan pemeliharaan ikan, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang serta mendukung kemajuan wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang mempunyai tingkat pemanfaatan yang tinggi. Namun akibat semakin tingginya aktivitas antropogenik, wilayah pesisir menjadi semakin terdegradasi. Beberapa hal yang menyebabkan kemunduran kualitas wilayah pesisir adalah masukan limbah dan buangan sampah, penyalahan penggunaan lahan, perusakan ekosistem, pelanggaran kebijakan wilayah, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan degradasi lingkungan (Hidayah & Suharyo, 2018).

2.2. Tata Ruang

Penataan ruang menjadi aspek penting dalam pembangunan suatu daerah. Penataan ruang di Indonesia mulanya telah diatur dalam UU No.24

Tahun 1992, akan tetapi dikarenakan telah adanya perkembangan kondisi yang ada maka peraturan lama dirasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu adanya peraturan baru yang mengatur mengenai penataan ruang. Pembentukan UU No.26 Tahun 2007 dilakukan dengan menimbang segala aspek yang ada.

Adapun ruang yang dimaksud didalam UU No.26 Tahun 2007 yakni meliputi ruang lautan, daratan, udara, serta sumber daya alam yang berguna bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang berada didalam ruang tersebut (Sugiarto, 2017). Menurut (Sugiarto, 2017), Penataan ruang merupakan suatu tahapan yang dilakukan secara sadar untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Suatu ruang tentunya memerlukan penataan untuk mengoptimalkan semua ruang yang ada guna menjaga keselarasan lingkungan agar memberikan tempat yang nyaman bagi makhluk hidup yang ada (Fujiastuti & Pigawati, 2014).

Penataan ruang merupakan tahapan yang menentukan struktur dan pola ruang, mulai dari persiapan hingga penetapan tata ruang. Rencana ruang yang dibuat akan tetap menggunakan ruang sesuai rencana. Pemanfaatan ruang adalah seperangkat unsur yang dapat membentuk corak lingkungan alam, sosial, dan buatan serta saling berhubungan untuk membentuk suatu rencana tata ruang (Irnawati & Sumaryono, 2011). Pemanfaatan tata ruang ini memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan tata ruang yang tertib. Menurut Tambunan dan Setiadarma (1997) dalam (Irnawati & Sumaryono, 2011), penataan ruang memiliki beberapa tujuan utama yakni :

1. Terlaksananya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dimana berpedoman pada wawasan nusantara.
2. Terlaksananya pengaturan dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya serta kawasan lindung.
3. Terealisasinya pemanfaatan yang berkualitas.

2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) adalah rencana pemanfaatan ruang wilayah yang dibentuk untuk menjaga keterpaduan pembangunan antar sektor dan mempersiapkan beberapa program pembangunan wilayah Kabupaten yang berjangka panjang (Fujiastuti & Pigawati, 2014). Menurut Chapin (1979) dalam (Fujiastuti & Pigawati, 2014), Penataan ruang pada suatu kawasan bertujuan untuk menentukan peruntukan lahan yang ideal dari ruang yang dibangun dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum. RTRW juga menjadi acuan pemanfaatan dan pengembangan kawasan di dalam wilayah kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten menjadi rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada beberapa rencana tata ruang yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi, serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (*Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri Nomor 1 Tahun 2018*, 2018).

Pemerintah daerah mempunyai kewenangannya sendiri dalam urusan otonomi daerah terkhusus dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan tata ruang. Pemerintah pusat menyelenggarakan perencanaan tata Ruang Wilayah Nasional, dimana Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk wilayah provinsi dan kewenangan kabupaten yakni perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau RTRW Kabupaten (Nasriaty N, 2016). Merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, dijelaskan bahwa setiap daerah Kabupaten diwajibkan membentuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang nantinya digunakan sebagai arahan pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan penerapan desentralisasi, serta otonomi daerah yang menitikberatkan pada kewenangan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten, termasuk perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau yang biasa disebut RTRW Kabupaten merupakan perencanaan tata ruang wilayah administrasi dalam kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000 dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun (Prasarana & Ruang, 2003). Menurut PERDA Kabupaten Banyuwangi No. 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, disebutkan bahwa RTRW merupakan hasil dari perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi. Dimana Wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang mana batas serta sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dapat dijadikan landasan dalam pembangunan yang dianggap perlu serta utama dan mempunyai nilai strategis dalam percepatan pembangunan

Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang selalu berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi dan sinergi, serta dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan program pembangunan untuk mencapai kepentingan umum, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Perencanaan tata ruang kabupaten memiliki beberapa fungsi bagi wilayah kabupaten tersebut. Berikut merupakan fungsi dari RTRW Kabupaten (Prasarana & Ruang, 2003):

- a) Sebagai dasar dari kebijaksanaan pokok perkembangan antar wilayah kabupaten.
- b) Digunakan sebagai media dalam mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta antar kawasan dan keselarasan antar sektor.
- c) Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah.
- d) Sebagai landasan bagi pengendalian pemanfaatan ruang.
- e) Sebagai landasan untuk pemberian izin pada lokasi pembangunan berskala besar.

- f) Sebagai rujukan dalam menyusun rencana tata ruang kawasan secara rinci.
- g) Sebagai media untuk mengalokasikan investasi yang diberikan oleh pemerintah, swasta, serta masyarakat.

2.4. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

Menurut Pedoman Teknis Penyusunan Peta Zonasi WP3K Provinsi, Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) merupakan Sebuah rencana yang menetapkan arah penggunaan sumber daya untuk setiap unit perencanaan yang melibatkan penentuan struktur wilayah dan pola ruang yang memuat aktivitas yang dapat dan tidak dapat dilakukan, serta aktivitas yang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin. Penyusunan rencana zonasi bertujuan untuk membagi wilayah pesisir menjadi zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan aktivitas yang saling menunjang dan memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan. penetapan zona menitikberatkan pada kegiatan dan prioritas utama terkait pemanfaatan aset pesisir untuk kemudahan pengelolaan dan pemanfaatan. (Suparno, 2009).

Berdasarkan pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP-3-K disusun dengan menyeleraskan, serta menyeimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota. RZWP-3-K berlaku hingga jangka waktu selama 20 tahun dengan peninjauan kembali tiap 5 tahun sekali. Arahan yang dimaksud dalam pasal 9 UU No. 27 Tahun 2007, yaitu arahan yang berisi tentang 1) Alokasi ruang dalam beberapa perencanaan kawasan serta alur ; 2) Keterikatan antar ekosistem pesisir serta pulau-pulau kecil dalam satu bioekoregion.

Penyusunan RZWP-3-K memerlukan beberapa data yakni dataset teresterial, bathimetri, geomorfologi dan geologi laut, oseanografi, ekosistem

pesisir, sumberdaya ikan, infrastruktur, pemanfaatan wilayah laut, penggunaan dan status lahan, sumberdaya air, ekonomi wilayah, demografi dan sosial termasuk masyarakat hukum adat, risiko bencana dan pencemaran, serta deposit pasir laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Dalam PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 pasal 2 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RZWP-3-K memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir.
- b) Ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Fungsi dari RZWP3K telah disebutkan dalam PERDA Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2018 pasal 7 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, adapun beberapa fungsi dari RZWP-3-K yakni :

- a) Sebagai bahan untuk mempertimbangkan penyusunan atau pembentukan rencana stuktur serta pola ruang dalam RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah pesisir di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Sebagai data untuk pertimbangan dalam pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi;
- c) Sebagai rujukan dalam penyusunan serta pembentukan Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi WP3K;
- d) Sebagai alat dalam penataan ruang di perairan laut WP3K;
- e) memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang serta memberikan rekomendasi dalam pemberian izin di perairan laut WP3K;
- f) sebagai rujukan apabila terjadi konflik di perairan laut WP3K;
- g) sebagai rujukan pemanfaatan ruang di perairan laut WP3K; serta
- h) sebagai rujukan dalam mewujudkan keteraturan pembangunan di WP3K.

2.5. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Penginderaan jauh dibagi menjadi dua berdasarkan sensor yang digunakan. Yaitu, pencitraan optik yang menggunakan sensor pasif yang menggunakan cahaya tampak dan inframerah untuk menerangi dari sinar matahari, dan pencitraan radar yang menggunakan sensor aktif yang tidak memerlukan sinar matahari dan menggunakan gelombang mikro (Putri & dkk, 2018). Sistem Informasi Geografis (SIG) ialah sistem informasi yang dipergunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengambil, memproses, menganalisis, serta menghasilkan inferensi geologi atau data geospasial. Data ini digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan suatu keputusan perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, serta layanan publik lainnya (Luthfina dkk, 2019).

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem informasi yang dibuat untuk mendukung pengambilan keputusan spasial, memungkinkan deskripsi tempat terintegrasi dengan karakteristik fenomena yang ada di lokasi tersebut (Susanty, Thamrin, & Disanda, 2016). Sistem Informasi Geografi (SIG) menggunakan basic data yang mempunyai rujukan berkoordinat geografi atau spasial dan menjadi sistem yang berbasis komputer (Saefudin & Susandi, 2020). Menurut (Barkey dkk, 2009), Ada sekitar 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam mendefinisikan serta membagi SIG, yakni :

1. pendekatan proses (*process oriented*) yaitu Serangkaian fitur canggih yang dapat digunakan para profesional untuk menyimpan, melihat, mengedit atau memperluas data geospasial.
2. pendekatan kegunaan alat (*toolbox approach*) yaitu Seperangkat alat untuk mengumpulkan, menyimpan, membuka, mengubah, dan menampilkan data spasial dari kondisi bumi yang sesungguhnya.
3. pendekatan data base (*database approach*) yaitu Sistem basis data yang sebagian besar datanya terindeks secara spasial dan dijalankan oleh

sekumpulan program yang dirancang untuk menjawab pertanyaan terkait data spasial/geografis.

Proyek SIG menggunakan beberapa data spasial yang dapat berasal dari berbagai sumber, umumnya sumber data spasial yang digunakan dalam proyek SIG untuk pembangunan basis data spasial yakni (Barkey dkk, 2009):

a. Peta Analog

Peta analog merupakan peta dalam bentuk *hardfile* atau cetak, peta analog meliputi peta topografi, tanah, kawasan perairan dan hutan, serta yang lain-lain. Peta analog umumnya dibuat dengan menggunakan teknik kartografi yang memungkinkan memiliki referensi spasial seperti skala, koordinat, arah mata angin, dan lainnya. Citra satelit atau foto udara umumnya digunakan sebagai sumber data pada peta analog yang meliputi wilayah luas. Peta analog yang akan digunakan sebagai sumber data dalam tahapan SIG diubah menjadi peta dalam bentuk *softfile* atau biasa disebut peta digital dengan cara merubah format raster menjadi vektor melalui proses digitasi, sehingga nantinya akan mendapatkan koordinat bumi yang sesungguhnya.

b. Citra Penginderaan Jauh

Sumber data terpenting dalam tahapan SIG adalah data penginderaan jauh meliputi citra satelit dan foto udara, terutama untuk keperluan pemantauan kondisi lahan. Hal ini dikarenakan data yang tersedia secara berkala dengan cakupan wilayah yang luas. Umumnya data citra satelit tersedia dalam format raster.

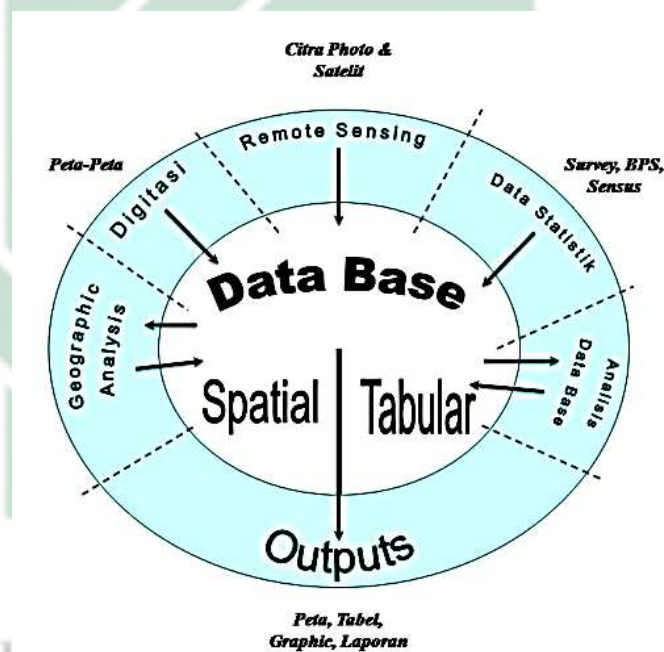
c. Data Hasil Pengukuran

Data yang diperoleh di lapangan berdasarkan teknologi pemetaan asli disebut dengan data pengukuran. Secara umum data yang diperoleh dari pengukuran ini merupakan sumber data atribut seperti

batas administrasi serta wilayah, batas kepemilikan tanah, batas hak pengelolaan dan lalu lintas jalan hutan.

d. *Data Global Positioning System*

Adanya teknologi *Global Positioning System* (GPS) membawa terobosan penting bagi penyediaan data SIG. Perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat ketelitian dalam pengukuran GPS menjadi semakin tinggi. Data yang didapatkan menggunakan GPS umumnya direpresentasikan dalam format vektor.



Gambar 1. Diagram Skematis Sistem Informasi Geografis.

(Sumber: Barkey dkk, 2009)

Menurut (Barkey dkk, 2009), Sumber data dalam SIG pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain, keterkaitan ini ditunjukkan pada (Gambar 1.). Sumber data utama dalam tahapan SIG adalah citra penginderaan jauh, peta dari citra penginderaan jauh, data survei tanah, dan peta dari GPS. Data turunan yang digunakan dalam tahapan atau proses SIG antara lain berupa hasil analisis database atribut maupun hasil analisis geografis.

2.6. Citra Sentinel-2

Sentinel-2 adalah satelit yang diluncurkan pada 2015 yang merupakan bagian dari program *European Space Agency's (ESA) Copernicus*. Satelit tersebut diluncurkan untuk memantau hutan, mendeteksi perubahan tutupan lahan, dan mengelola bencana alam. (Putri & dkk, 2018). Tujuan peluncuran Sentinel-2 adalah untuk memastikan kelanjutan misi Landsat 5/7, SPOT5, SPOTVegetation, dan Envisat MERIS. Misi ini memberikan citra satelit resolusi spasial dan waktu yang tinggi untuk data pemetaan permukaan bumi terbaru. (Oktaviani & Kusuma, 2017).

Citra Sentinel-2 dapat dimanfaatkan sebagai data untuk pemantauan lahan, dimana data penggunaan lahan nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai aplikasi pemantauan serta perencanaan lingkungan (Putri & dkk, 2021). Citra Sentinel-2 memiliki 13 band spektral, 3 band beresolusi 60m, 3 band beresolusi 20m, dan 4 band beresolusi spasial 10m dengan area sapuan 290km (Putri & dkk, 2021).

Tabel 1. Karakteristik spectrum panjang gelombang dan resolusi spasial masing-masing saluran Sentinel-2

Band	Spektrum	Panjang gelombang (μm)	Resolusi spasial (m)
1	<i>Coastal Aerosol</i>	0.433 – 0.453	60
2	<i>Blue</i>	0.458 – 0.523	10
3	<i>Green</i>	0.543 – 0.578	10
4	<i>Red</i>	0.650 – 0.680	10
5	<i>Vegetation Red Edge1</i>	0.698 – 0.713	20
6	<i>Vegetation Red Edge2</i>	0.733 – 0.748	20
7	<i>Vegetation Red Edge3</i>	0.765 – 0.785	20
8	<i>NIR</i>	0.785 – 0.900	10
8a	<i>Vegetation Red Edge4</i>	0.855 – 0.875	20
9	<i>Water Vapour</i>	0.855 – 0.875	60
10	<i>SWIR-Cirrus</i>	1.365 – 1.385	60
11	<i>SWIR1</i>	1.565 – 1.655	20
12	<i>SWIR2</i>	2.100 – 2.280	20

(Sumber : ESA, 2015)

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan literatur terdahulu terkait dengan Analisis Kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan RTRW dan RZWP3K sebagai perbandingan serta guna mempermudah dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan yakni penggunaan citra satelit sentinel-2 serta lokasi penelitian yang berbeda. Wilayah yang berbeda memberikan informasi yang berbeda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada topografi wilayah, karakteristik wilayah, serta karakteristik masyarakatnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam penelitian ini :

NO.	JUDUL	DESKRIPSI	PERBEDAAN
1.	Studi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Laut Berdasarkan Rtrw Dan Rzwp-3-K Di Wilayah Pesisir Kota Probolinggo	<p>Penulis : Novita Hariyanti</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kota Probolinggo terdiri dari 8 kelas yakni sempadan pantai; perikanan sebesar; pertanian; permukiman; sungai; pariwisata; industri; dan transportasi, sedangkan Pemanfaatan ruang laut di Kota Probolinggo meliputi 4 zona yakni migas; Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP); pipa kabel bawah laut; dan pelayaran. • Kesesuaian pemanfaatan ruang pesisir terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berlokasi di Kota Probolinggo, menggunakan citra satelit SPOT-7 untuk diolah, serta menggunakan perangkat lunak ENVI 5.3 sebagai software pengolahan data citra pemanfaatan ruang.

NO.	JUDUL	DESKRIPSI	PERBEDAAN
		<p>RTRW Kota Probolinggo sebesar 60,34%, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kota Probolinggo terhadap RZWP3K sebesar 72,45%.</p>	
2.	<p>Evaluasi Kesesuaian Lahan Dan Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Mandau</p>	<p>Penulis : Ade Wahyudi Tahun : 2019 Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentase pemanfaatan lahan yang sesuai dengan pola ruang yakni sebesar 79,9%; pola ruang yang tidak sesuai sebesar 3,3%; sedangkan pola ruang yang belum terealisasi sebesar 8,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan yang terdapat di Kecamatan Mandau sudah sesuai dengan pola ruang, baik berupa pemanfaatan lahan eksisting maupun yang belum terealisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis serta bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatam ruang berdasarkan RTRW dan RDTR, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Mandau demi merealisasikan tertib ruang,
3.	<p>Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir</p>	<p>Penulis : Annisa' Kunny Latifa, Yanto Budisusanto, dan Cherie Bhekti Pribadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra pleadis, serta cakupan

NO.	JUDUL	DESKRIPSI	PERBEDAAN
	Berdasarkan RZWP-3-K dan RTRW di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang	<p>Tahun : 2019</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutupan lahan yang sesuai dengan RTRW sebesar 77% dan terdapat kondisi tumpang tindih di kawasan laut pesisir selatan Kabupaten Sampang, sedangkan pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP3K yakni sebesar 57% serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut. 	wilayah yang diteliti yakni wilayah pesisir dan laut di selatan Kabupaten Sampang yang terdiri dari beberapa kecamatan. Metode uji Ketelitian klasifikasi menggunakan perhitungan matriks konfusi (<i>confussion matrix</i>) yakni uji ketelitian keseluruhan (<i>overall accuracy</i>), serta <i>kappa accuracy</i> untuk mengetahui tingkat keerratan.
4.	Kondisi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kota Surabaya	<p>Penulis : Adhitama Jaya Kusuma dan Anak Agung Sagung Alit Widyastuty</p> <p>Tahun : 2020</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nilai kesesuaian pemanfaatan lahan di UP II Kertajaya mencapai 43,75%, sedangkan 42,38% sebagai lahan tambak.menjadi lahan terluas pemanfaatan ruang di UP II Kertajaya yang tidak sesuai dengan tujuan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini tidak berfokus pada wilayah pesisir melainkan pada 2 kecamatan yang tergabung dalam satu unit pengembangan. Evaluasi pemanfaatan ruang eksisting pada penelitian ini berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

NO.	JUDUL	DESKRIPSI	PERBEDAAN
		<p>pengembangan.</p> <p>Sehingga nantinya lahan yang tidak sesuai akan dihilangkan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang UP II Kertajaya.</p>	
5.	<p>Analisis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten</p>	<p>Penulis : Siti Maesaroh, Baba Barus, dan Laode Syamsul Iman</p> <p>Tahun : 2013</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian lahan dalam pemanfaatan budidaya laut berada di perairan Pagelaran-Panimbang; Pemanfaatan lahan konservasi perairan berada di perairan Taman jaya sekitar Pulau Badul; Wilayah yang paling sesuai untuk dijadikan kawasan pariwisata bahari berada di perairan Sukaresmi - Tanjung Jaya, serta kawasan pulau-pulau kecil di Ujung kulon; Pelabuhan perikanan pantai lebih sesuai di desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berfokus pada identifikasi permasalahan, analisis faktor dominan yang mempengaruhi pemanfaatannya, serta kesesuaian ruang untuk perikanan, budidaya perikanan, pariwisata marin, pelabuhan perikanan, dan konservasi laut. Metode yang digunakan dalam analisis adalah metode Proses Analisis Jaringan (<i>ANP – Analytic Network Process</i>) dan analisis spasial tumpang-tindih (<i>Overlay</i>). Lokasi penelitian mencakup wilayah pesisir di Kabupaten Pandeglang.

NO.	JUDUL	DESKRIPSI	PERBEDAAN
		Pejamben, Carigin, Cigondang serta desa Teluk.	
6.	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Pati	<p>Penulis : Muhammad Annis Wichi Luthfina , Bambang Sudarsono, Andri Suprayogi.</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan luas penggunaan lahan di Kecamatan Pati dalam kurun waktu 8 tahun yaitu 1,33% untuk permukiman kota; 0,02% untuk permukiman desa; 0,44% untuk industri; 1,74% untuk pertanian lahan basah; dan 0,04% untuk pertanian hortikultura. • Kesesuaian penggunaan lahan pada Kecamatan Pati tahun 2017 terhadap RTRW Kabupaten Pati tahun 2010-2030 yakni sebesar 55,96% atau seluas 2.536,73 ha dari total luas Kecamatan Pati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan 2 citra satelit yang berbeda untuk peta penggunaan lahan pada tahun 2009 dan 2017. Citra yang digunakan yakni citra Quickbird untuk tahun 2009 dan citra Sentinel 2A untuk tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis perubahan penggunaan lahan pada tahun 2009 dan 2017, serta kesesuaian antara penggunaan lahan yang ada di lapangan dengan rencana tata ruang/wilayah (RTRW).

2.8. Integrasi Keilmuan

Alam Semesta merupakan Ciptaan Allah yang teramat indah serta mempunyai sejuta kekayaan yang disediakan untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia memanglah penggerak serta pengatur dunia, namun tanpa adanya alam ciptaan Allah SWT manusia takkan mungkin dapat bertahan. Alam dan Manusia memiliki suatu hubungan timbal balik yang tidak akan pernah dapat dihentikan. Keseimbangan alam tentunya sangatlah penting bagi berlangsungnya kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi. Segala sesuatu yang diciptakan Allah di muka bumi ini memang ditujukan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah : 29).

Ada banyak cara yang dapat dilakukan manusia untuk bersyukur atas alam yang telah diciptakan Allah, salah satunya dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang mensyukuri ciptaan Allah maka niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Hal ini telah tercantum dalam QS. Ibrahim ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrahim: 7).

Manusia sebagai khalifah di bumi maka tentunya harus senantiasa menjaga apa yang telah diberikan Allah SWT. Seperti yang telah disampaikan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: ” Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30).

Berdasarkan ayat diatas dikatakan bahwa manusia sebagai khalifah seringkali melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan serta pembangunan yang dilakukan manusia terkadang kurang memperhatikan aspek-aspek yang dapat menimbulkan kerusakan pada alam itu sendiri. Akan tetapi, manusia sebagai khalifah juga turut andil dalam menjaga ciptaan Allah di muka bumi ini. Salah satunya dengan penyusunan perencanaan pemanfaatan serta pembangunan guna mengurangi resiko terjadinya kerusakan. Persoalan penyusunan keputusan yang dilakukan oleh khalifah atau pemimpin ini telah disampaikan Allah dalam QS. Shaad ayat 26 yang berbunyi :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Shad: 26).

Sebagai khalifah di bumi tentunya wajib membuat keputusan yang adil serta tidak mengutamakan hawa nafsu. Hawa nafsu dalam pemanfaatan lahan ini dapat berupa rasa ingin memanfaatkan lahan yang ada untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperdulikan kelestarian alam yang ada. RTRW dan RZWP3K sebagai perencanaan pemanfaatan dan pembangunan di susun dengan mempertimbangan segala hal dari aspek kondisi sosial masyarakat, kelestarian alam, serta aturan-aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, pemanfaatan serta pembangunan yang dilakukan seharusnya sesuai dengan RTRW dan RZWP3K yang telah dibuat. Hal ini telah dijelaskan Allah SWT pada QS.Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-A'raf: 56)

Dalam Surat Al-A'raf ayat 56 telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memperingatkan manusia untuk tidak merusak apa yang telah di ciptakan Allah SWT di muka bumi ini. Segala kebesaran Allah SWT yang ada di muka bumi ini hendaknya di manfaatkan dengan baik agar tidak merusak yang diberikan Allah SWT. Alam di ciptakan dalam keadaan baik, maka tugas manusia sebagai makhluk Allah adalah untuk menjaganya dan memperbaiki yang telah rusak. Manusia dapat memanfaatkan segala kekayaan alam yang diberikan Allah di muka bumi ini, salah satunya yakni lautan. Pemanfaatan alam ini tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek agar tidak menimbulkan kerusakan pada alam yang telah di ciptakan Allah SWT. Manusia yang berbuat baik dengan menjaga segala sesuatu yang telah di

ciptakan Allah SWT di muka bumi, maka Allah akan memberikan rahmat-Nya.

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan menjadi salah satu bentuk implementasi masyarakat serta pemerintah dari hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abû Sa’id Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”*”

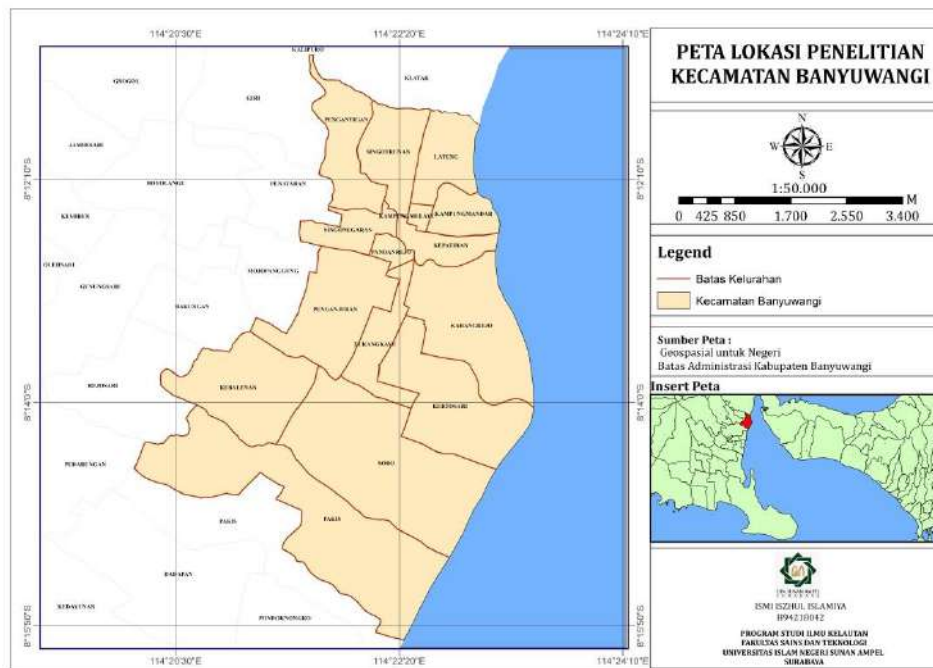
Adapun hal yang tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain yang dimaksud dalam masalah ini yakni pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang dapat membahayakan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sejatinya perencanaan pemanfaatan ruang wilayah disusun dengan tujuan memanfaatkan alam yang diciptakan Allah tanpa menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan, sehingga pembangunan daerah yang dilakukan diharapkan tidak merusak alam yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei - Oktober 2022. Lokasi penelitian ini berada di kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banyuwangi yang termasuk kedalam wilayah pesisir. Ada 18 kelurahan yang berada di Kecamatan Banyuwangi yakni Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampung Melayu, Kampungmandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Sumberrejo, dan Taman Baru (*Kecamatan Banyuwangi Dalam Angka 2020*, 2020).



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Olah Data, 2022)

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat - alat

Alat dan Bahan digunakan dalam penelitian ini untuk membantu proses pengumpulan serta menganalisis data. Adapun alat-alat yang digunakan yakni Laptop, *Global Position System* (GPS), kamera, dan *Software ArcGIS*. Berikut merupakan fungsi dari masing-masing alat yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 2. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian

No	Alat	Fungsi
1.	Laptop	Sebagai alat pengoprasian perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data
2.	<i>Global Position System</i>	Untuk mengetahui titik koordinat lokasi penelitian
3.	<i>Camera</i>	Sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil survey lapangan
4.	<i>Software ArcGIS</i>	Untuk mengolah data analisis secara spasial

3.2.2 Bahan-bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Citra satelit Sentinel-2, Peta RTRW Kabupaten Banyuwangi, Peta RZWP3K Provinsi Jawa Timur, dan Data Eksisting Ruang Laut Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan fungsi dari masing-masing bahan yang digunakan dalam penelitian ini:

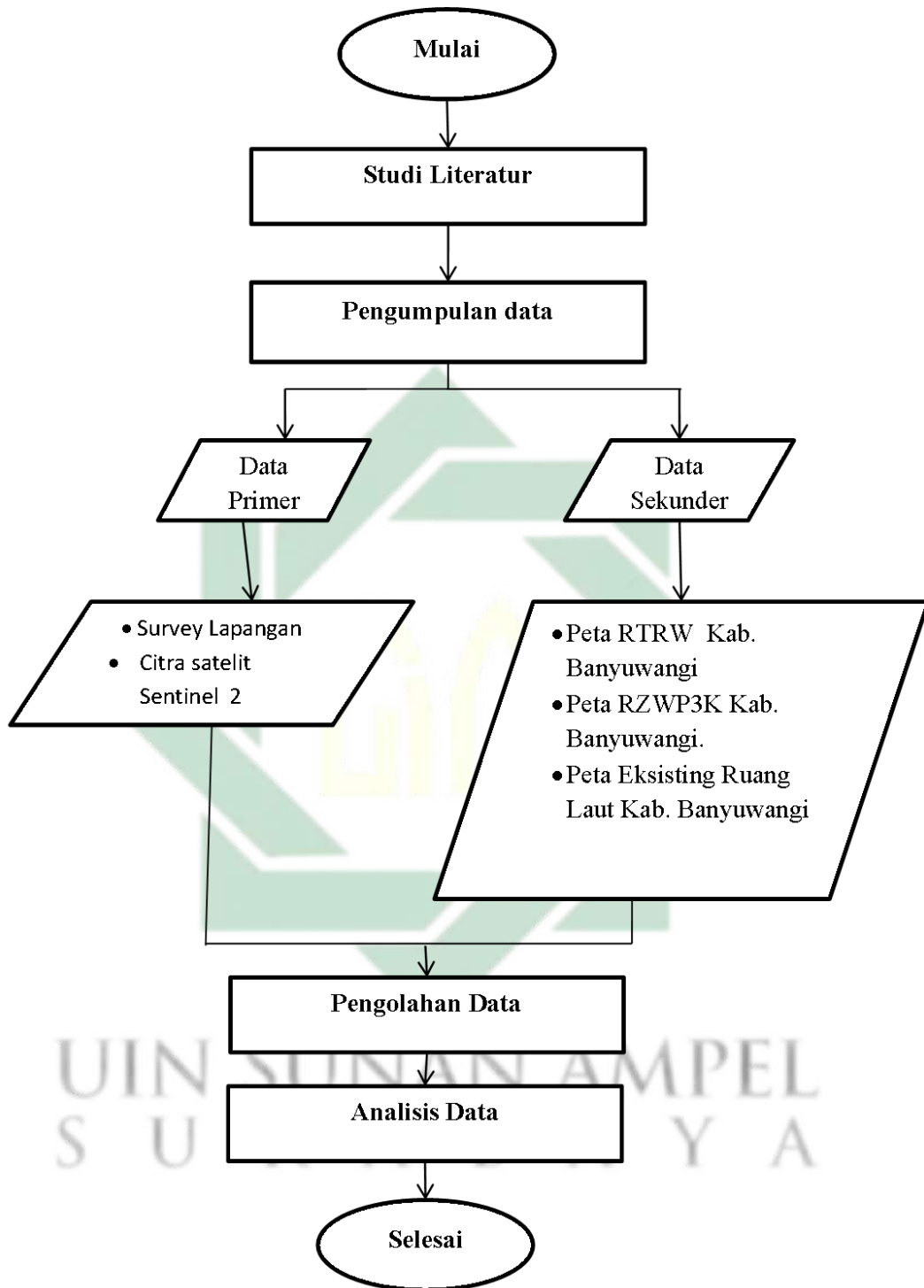
Tabel 3. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian

No	Bahan	Fungsi
1.	Citra satelit Sentinel-2	sebagai mengetahui permukaan bumi sesungguhnya
2.	Peta RTRW Kecamatan Banyuwangi	sebagai evaluasi hasil tutupan lahan
3.	Peta RZWP3K Kecamatan Banyuwangi	sebagai evaluasi hasil penggunaan ruang laut
4.	Data Eksisting Ruang Laut Kecamatan Banyuwangi	Untuk diolah dan dianalisis pemanfaatan ruang laut

3.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, tahapan penelitian ditunjukkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) seperti pada (*Gambar 3.*). Tahap pertama dalam penelitian ini yakni studi literatur terkait penelitian yang sedang dilakukan. Tahap selanjutnya yakni pengumpulan data, adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer maupun sekunder yang telah didapatkan kemudian diolah serta dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian.





Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai topik penelitian melalui jurnal, buku, maupun skripsi yang dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan penelitian. Literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini berkaitan

dengan Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP3K di Kecamatan Banyuwangi.

3.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Adapun jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer yakni informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti saat di lapangan dengan melakukan observasi, dan dokumentasi, serta Citra Satelit Sentinel-2. Berikut adalah data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

NO	Data	Sumber Data	Subjek
1.	Validasi kesesuaian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Survey Lapangan (<i>ground Check</i>) • Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Titik lokasi klasifikasi pemanfaatan ruang.
1.	Citra Satelit Sentinel-2	<ul style="list-style-type: none"> • USGS 	<ul style="list-style-type: none"> • Citra Satelit sentinel-2 Tahun 2022.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang tidak berasal langsung dari peneliti, umumnya data sekunder berasal dari penelitian terdahulu maupun sumber data lain (syafnidawaty, 2020). Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

NO.	Data	Sumber Data	Subjek
1.	Peta RTRW Kecamatan Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PUCKPP Banyuwangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta RTRW Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032.
2.	Peta RZWP3K Kecamatan Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • DKP Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta RZWP3K Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2038.

NO.	Data	Sumber Data	Subjek
3.	Data Eksisting Ruang Laut Kecamatan Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> DKP Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> Peta Tematik pemanfaatan ruang laut eksisting Provinsi Jawa Timur.

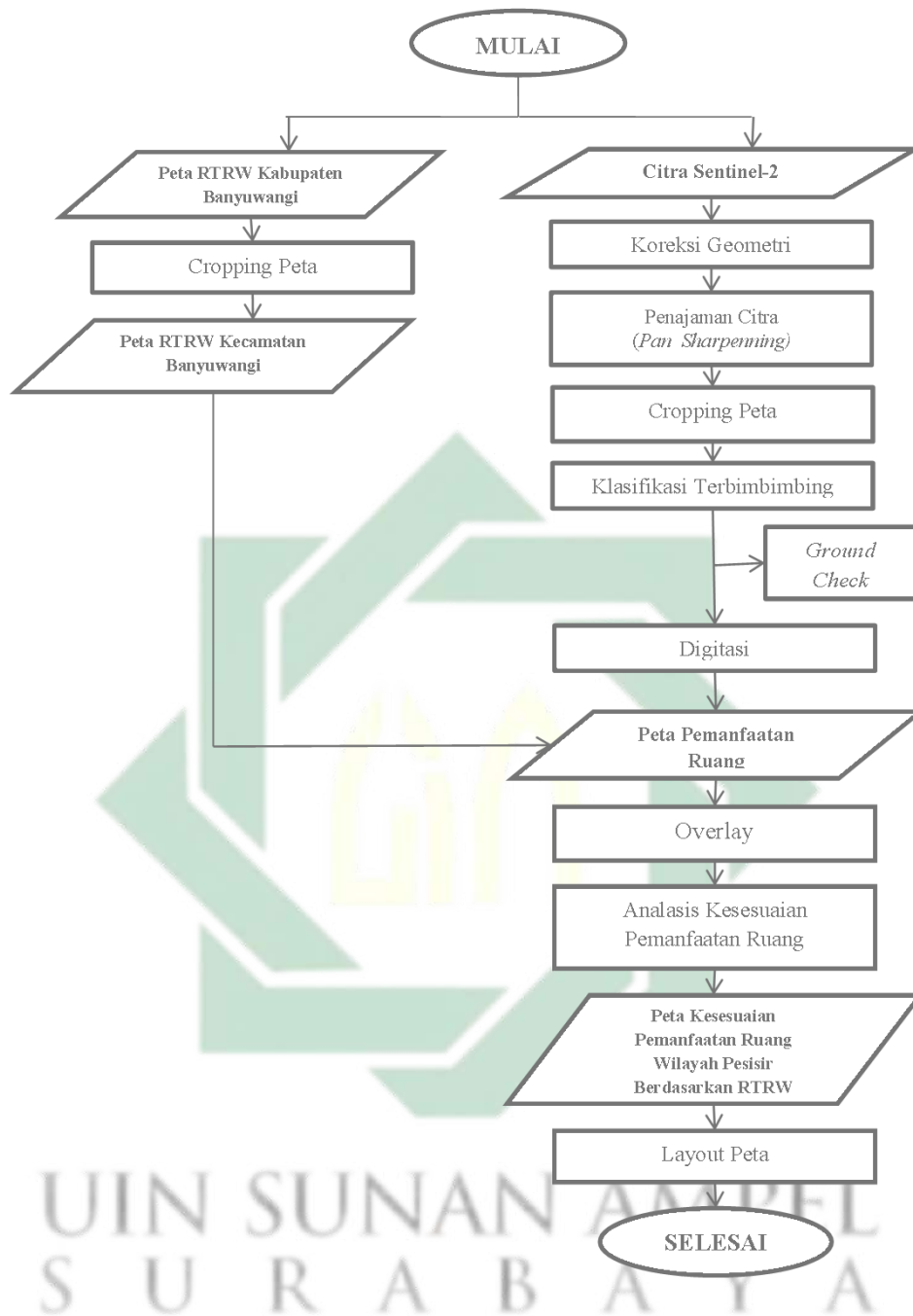
3.4.3 Pengolahan Data

Data yang diperoleh diolah menggunakan software ArcGis untuk mendapatkan peta kesesuaian pemanfaatan pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW dan RZWP3K. Berikut Langkah-langkah pengolahan data pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut :

a) Pemanfaatan Ruang wilayah pesisir

Pengolahan data dalam pembuatan peta kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan pengolahan data peta kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi telah disajikan dalam diagram alir (*Gambar 4.*).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 4. Diagram Alir Pengolahan Data Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi

Tahapan dalam pengolahan data peta kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi yakni sebagai berikut :

1) Koreksi Geometrik

Koreksi geometrik ialah suatu proses untuk mengoreksi posisi citra berdasarkan posisi yang sebenarnya di permukaan bumi. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan posisi pada tiap piksel citra terhadap objek yang ada di permukaan bumi (Sari dkk, 2018).

Citra yang mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk, skala, serta proyeksi adalah hasil transformasi citra yang dihasilkan dari penginderaan jauh (Nilasari dkk, 2017).

Penempatan kembali posisi piksel sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat gambaran objek di permukaan bumi yang terekam sensor pada citra digital yang telah ditransformasi merupakan transformasi geometrik yang paling mendasar (Nilasari dkk, 2017). Penelitian ini menggunakan sistem koordinat menggunakan proyeksi datum WGS1984 zona UTM49 sebagai dasar koreksi geometrik citra satelit yang digunakan.

2) Penajaman Citra (*Pan Sharpening*)

Penajaman Citra atau *Pan Sharpening* merupakan proses perpaduan atau penggabungan citra satelit multispektral beresolusi spasial rendah dan spektral tinggi dengan citra pankromatik beresolusi spasial tinggi dan spektral rendah (Agrafiotis dkk, 2016). Penggabungan dari dua atau lebih citra menjadi satu citra ini mempertahankan fitur penting yang ada pada masing-masing citra yang dikombinasikan (Pradipta dkk, 2019). Proses ini bertujuan untuk mendapatkan citra dengan kenampakan objek yang lebih baik sehingga mempermudah proses pengamatan.

3) Cropping Peta(*Area*)

Cropping citra atau pemotongan citra merupakan salah satu jenis transformasi geometrik yang bertujuan untuk mendapatkan area yang diinginkan pada citra digital (Budisanjaya & Kunci, 2013).

4) Klasifikasi Terbimbing

Klasifikasi terbimbing merupakan klasifikasi berdasarkan kriteria pengelompokan kelas sesuai dengan penciri kelas yang didapatkan melalui pembuatan area contoh (*training area*) (Purwanto dkk, 2019). Klasifikasi terbimbing dilakukan untuk merubah data citra multispektral ke dalam beberapa kelas unsur spasial dalam bentuk informasi tematis (Purwanto dkk, 2019).

5) Ground Check

Pengecekan Lapangan (*Ground Check*) bertujuan untuk mengamati kesesuaian kondisi tutupan lahan yang didapatkan dalam peta dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan (Togatorop, 2018). Kegiatan *ground check* dilakukan dengan bantuan *Global Position System* (GPS). Penentuan

titik sampel pada kegiatan *ground check* dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*, yaitu yang mewakili setiap jenis tutupan lahan yang ditemukan dalam peta penelitian.

Hasil yang didapatkan dari pengecekan lapangan (*Ground Check*) kemudian dihitung tingkat keakurasiannya dengan menggunakan matriks konfusi. Matriks konfusi (*Confusion matrix*) merupakan suatu matriks dalam bentuk table yang menunjukkan korelasi antara sampel data pada kondisi yang sebenarnya dengan hasil klasifikasi berdasarkan interpretasi (Luthfina dkk, 2019). Matriks konfusi (*Confusion matrix*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *overall Occuracy*. Menurut (Jensen (1996) dalam (Asma, 2018)), Adapun rumus *Overall Occuracy* yang digunakan untuk uji akurasi yakni sebagai berikut :

$$\text{Overall Accuracy} = D / N \times 100\%$$

Keterangan :

D = Total titik sampel yang benar

N = Total keseluruhan titik sampel

6) Digitasi

Digitasi merupakan suatu proses konversi data analog (*format raster*) kedalam peta digital (*format digital*), objek dalam format raster seperti jalan, rumah, dan lainnya menjadi objek-objek vector (Sitepu dkk, 2017).

Proses ini bertujuan untuk mempermudah pengerjaan peta pada tahap selanjutnya yakni klasifikasi lahan pada peta.

7) Overlay

Overlay merupakan suatu proses penggabungan dari beberapa peta individu yang memiliki informasi spesifik menjadi satu peta. Proses ini dilakukan dengan 2 atau lebih jenis peta yang berbeda secara teknis yang kemudian dioverlaykan (Woltjer, 2014). Proses ini menggunakan peta pemanfaatan ruang wilayah pesisir kecamatan Banyuwangi yang di overlay dengan peta RTRW Kecamatan Banyuwangi tahun 2012-2032.

8) Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Proses analisis kesesuaian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang ada dilapangan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Banyuwangi.

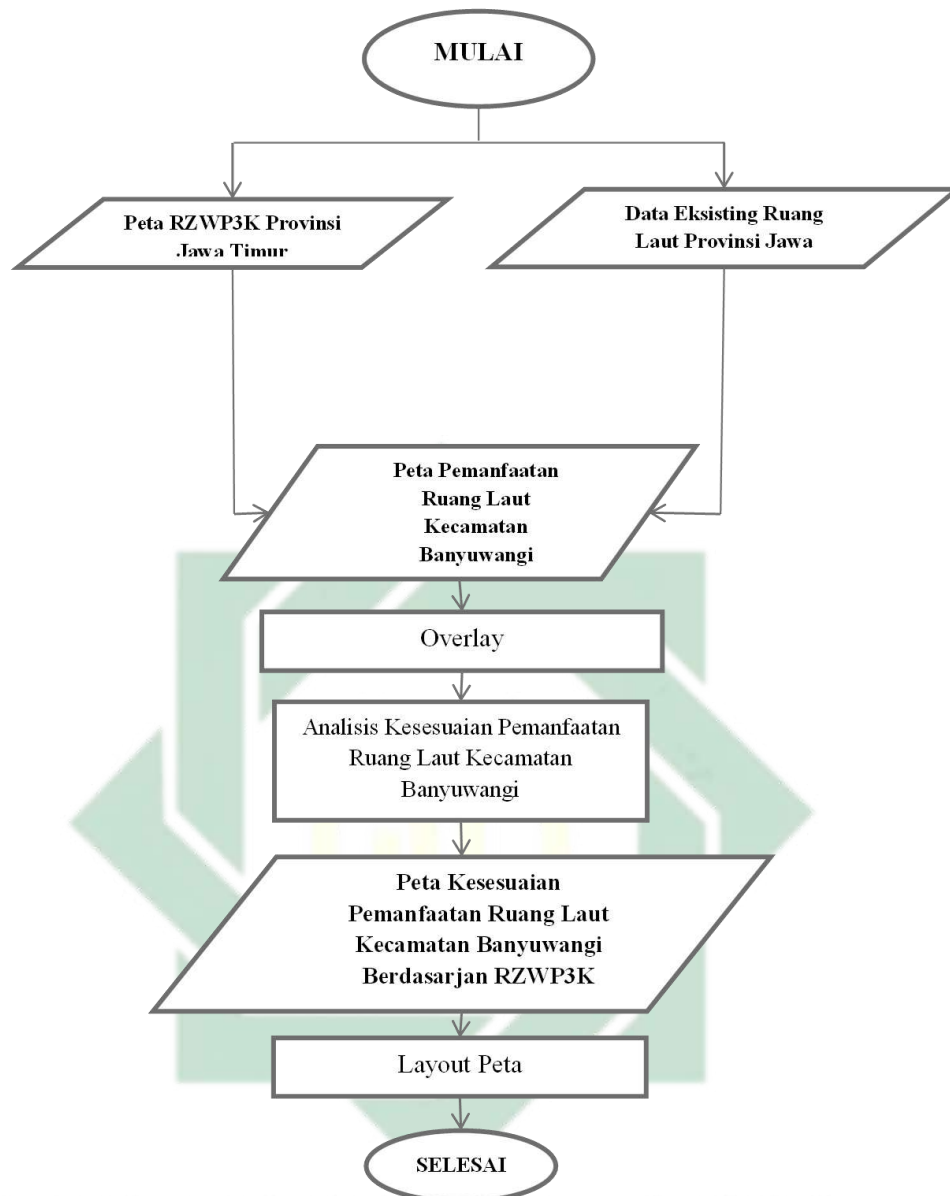
9) Layout Peta

Layout peta adalah tahap terakhir dalam proses sistem informasi geografi (SIG) yaitu dengan melakukan desain peta berdasarkan kaidah kartografis yang benar (Purwanto, 2017). Tujuan dari layout peta yakni untuk mempermudah pengguna dalam memahami peta yang telah dibuat. Proses layout peta pada penelitian ini menggunakan *software ArcGIS 10.8*.

b) Pemanfaatan Ruang Wilayah Laut

Pengolahan data dalam pembuatan peta kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RZWP3K melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan pengolahan data peta kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RZWP3K tahun 2018-2038 telah disajikan dalam diagram alir (*Gambar 5*).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 5. Diagram Pengolahan Data Pemanfaatan Ruang Laut Kecamatan Banyuwangi

Tahapan dalam pengolahan data peta kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi yakni sebagai berikut :

1) Overlay

Proses ini menggunakan peta pemanfaatan ruang laut eksisting kecamatan Banyuwangi yang di overlay dengan peta RZWP-3-K Kecamatan Banyuwangi tahun 2018-2038. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengamati kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Dalam tahap ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam mengamati peta kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

2) Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Proses analisis kesesuaian ini dilakukan untuk mengamati serta mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang ada dilapangan terhadap RZWP3K di Kecamatan Banyuwangi.

3) Layout Peta

Tahap layout peta dilakukan dengan menggunakan *software* ArcGIS 10.8 dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami serta membaca peta kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting terhadap RZWP-3-K Kecamatan Banyuwangi.

3.4.4 Analisis Data

1) Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir

Data pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang telah diolah kemudian dianalisis kesesuaian ruang pesisir berdasarkan RTRW Kecamatan Banyuwangi dengan menggunakan koreksi citra satelit sentinel-2. Data yang digunakan sebagai pembanding dalam analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir ini yakni data RTRW Kecamatan Banyuwangi. Kemudian hasil pengolahan data pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi di perkuat dengan data ground check guna memvalidasi setiap kelas klasifikasi pemanfaatan ruang wilayah di pesisir yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan peta pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Analisis data kesesuaian dilakukan dengan menggunakan hasil overlay dari peta pemanfaatan ruang wilayah Pesisir dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hasil overlay peta ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas terkait kondisi spasial antara keadaan sebenarnya dengan peta rencana tata ruang dan wilayah di Kecamatan Banyuwangi. Adapun luasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir pada setiap kelas klasifikasi dilihat dengan cara menghitung luasan menggunakan *calculate geometry* di *Software ArcGIS*.

2) Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi dilihat dari hasil overlay antara dua peta yakni peta pemanfaatan ruang laut dengan peta RZWP3K Kecamatan Banyuwangi. Dimana peta pemanfaatan ruang laut Kecamatan Banyuwangi didapatkan dari hasil olahan peta Eksisting Ruang Laut Provinsi Jawa Timur. Hasil overlay kedua peta ini kemudian di analisis terkait kesesuaian antara pemanfaatan ruang laut dengan Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) di Kecamatan Banyuwangi dengan menggunakan *Software ArcGIS*.

3.5 Penyusunan Laporan

Data Kesesuaian pemanfaatan pesisir dan laut berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi telah didapatkan kemudian dilakukan penyusunan laporan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dari hasil yang telah didapat untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Dengan ditariknya kesimpulan ini, diharapkan pembaca lebih mudah mempelajari jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

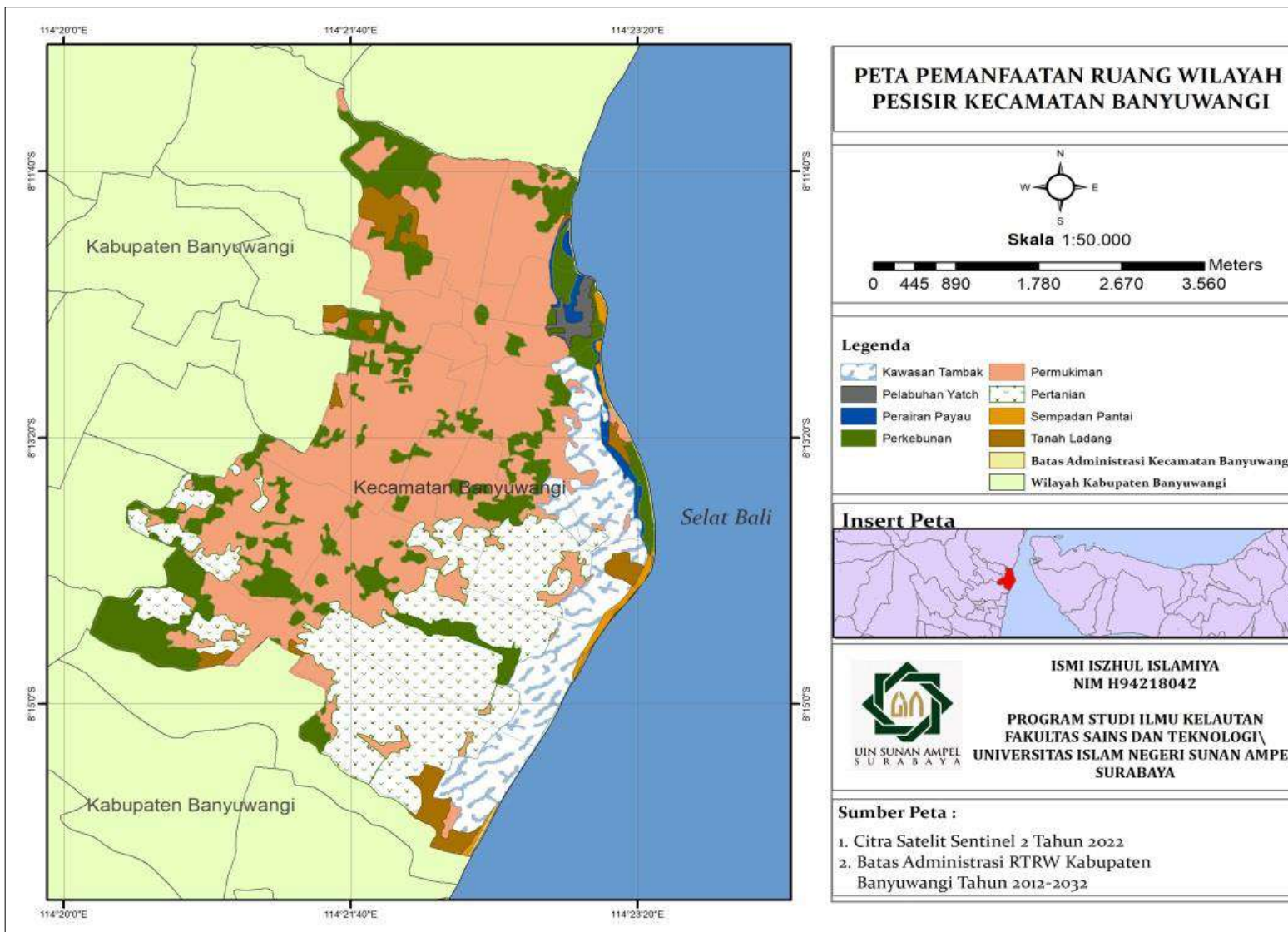
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemanfaatan Eksisting Ruang Wilayah Pesisir dan Laut di Kecamatan Banyuwangi

4.1.1. Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022

Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dimana kecamatan Banyuwangi disebut sebagai ibukota kabupaten Banyuwangi dan menjadi pusat kegiatan wilayah (RTRW,2012). Berdasarkan analisis spasial citra satelit sentinel 2 tahun 2022 yang diolah menggunakan *software* ArcGIS, terdapat 8 kelas pemanfaatan ruang eksisting pada Peta Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022 (*Gambar.6*). Pengklasifikasian pemanfaatan ruang ini merujuk pada pola ruang perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Penggambaran pemanfaatan ruang wilayah pesisir eksisting di Kecamatan Banyuwangi dapat dilihat di Gambar 1.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 6. Peta Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022

(Sumber : Olah Data, 2022)

Adapun 8 kelas pemanfaatan ruang eksisting wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi yang disajikan dalam (Tabel 4.) yaitu Perairan payau, Permukiman, Pertanian, Perkebunan, Pelabuhan Yacht, Sempandan Pantai, Kawasan Tambak, serta Tanah Ladang. Berdasarkan (Tabel 4.) pemanfaatan ruang eksisting wilayah pesisir di kecamatan Banyuwangi di dominasi oleh permukiman dengan luas 1197 Ha (11,97 km²) atau 46,08% dari total luas wilayah pesisir kecamatan Banyuwangi. sedangkan untuk pemanfaatan ruang eksisting lainnya ada pertanian seluas 593 Ha dengan persentase 22,34%, Perkebunan seluas 444 Ha dengan persentase 16,72%, Perairan Payau seluas 28 Ha dengan persentase 1,05%, Sempadan Pantai 18 Ha dengan persentase 0,68%, Tanah Ladang seluas 83 Ha dengan persentase 3,13%, Kawasan Tambak seluas 277 Ha dengan persentase 10,43%, dan pemanfaatan ruang dengan luas terkecil dengan persentase 0,60% yakni pelabuhan yacht sebesar 16 Ha.

Tabel 4. Luas pemanfaatan ruang wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi

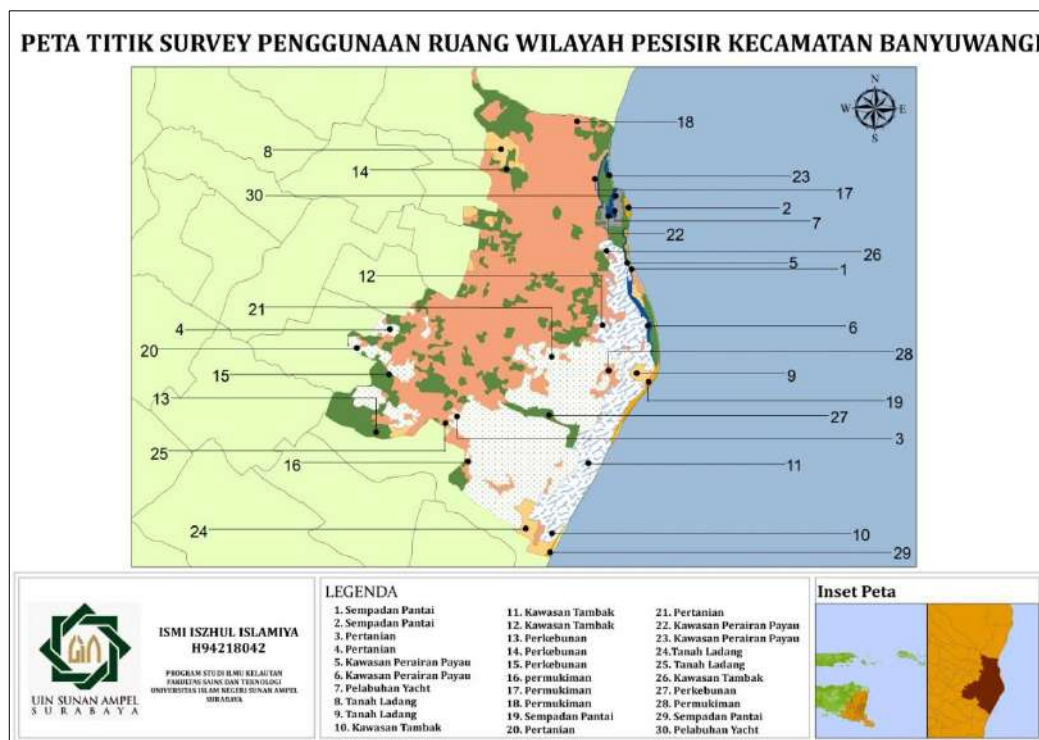
No.	Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Perairan Payau	28.0	1.05
2	Permukiman	1197.0	45.08
3	Perkebunan	444.0	16.72
4	Pertanian	593.0	22.34
5	Pelabuhan Yatch	16.0	0.60
6	Sempandan Pantai	18.0	0.68
7	Kawasan Tambak	277.0	10.43
8	Tanah Ladang	83.0	3.13
TOTAL		2656.0	100.0

(Sumber: Olah Data, 2022)

4.1.1.1. Pengecekan Lapangan (*Ground Check*)

Pengecekan lapangan atau *ground check* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui antara hasil kenampakan obyek pada citra dengan kenampakan obyek yang ada dilapangan (Administrator, 2022), sehingga hasil dari *ground check* ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi dari peta penggunaan ruang wilayah pesisir eksisting di Kecamatan Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan 30 titik pengecekan lapangan yang terbagi masing-masing 4 titik pada 7 kelas yakni permukiman; perkebunan; pertanian; kawasan tambak; tanah ladang; sempadan pantai; serta perairan payau, sedangkan untuk kelas pelabuhan yacht terdapat 2 titik


pengecekan. Adapun titik pengecekan dapat dilihat pada peta titik survey penggunaan ruang wilayah pesisir kecamatan Banyuwangi (Gambar 7.).



Gambar 7. Peta Ground Check Penggunaan Ruang Wilayah Pesisir Kecamatan Banyuwangi
(Sumber: Olah Data, 2022)

Penentuan titik pengecekan ini didapatkan dari hasil overlay pada masing-masing kelas dengan peta RTRW Kabupaten Banyuwangi dengan mengambil 2 titik sesuai dan 2 titik yang tidak sesuai maupun belum sesuai. Melakukan pengecekan Lapangan (*Ground check*) ini selain guna mengetahui tingkat akurasi peta, Hal ini dimaksudkan juga untuk memvalidasi hasil overlay yang telah dilakukan. Berikut merupakan hasil dokumentasi pada kegiatan *ground check* pada tiap titik pengecekan di setiap kelas klasifikasi di kecamatan Banyuwangi:

Tabel 5. Hasil Ground Check peta pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Eksisting di Kecamatan Banyuwangi






NO.	Koordinat	GUNA LAHAN		Dokumentasi	Keterangan
		Citra satelit	Hasil Survey		
1.	114.386052°E 8.218635°S	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai		BENAR

NO.	Koordinat	GUNA LAHAN		Dokumentasi	Keterangan
		Citra satelit	Hasil Survey		
2.	114.385565°E 8.208512°S	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai		BENAR
3.	114.357412°E 8.242811°S	Pertanian	Pertanian		BENAR
4.	114.346376°E 8.228478°S	Pertanian	Pertanian		BENAR
5.	114.385326°E 8.217582°S	Kawasan Perairan Payau	Kawasan Perairan Payau		BENAR
6.	114.388685°E 8.227929°S	Kawasan Perairan Payau	Kawasan Perairan Payau		BENAR
7.	114.383218°E 8.208997°S	Pelabuhan Yacht	Pelabuhan Yacht		BENAR

NO.	Koordinat	GUNA LAHAN		Dokumentasi	Keterangan
		Citra satelit	Hasil Survey		
8.	114.364604°E 8.198952°S	Tanah Ladang	Tanah Ladang		BENAR
9.	114.386873°E 8.235711°S	Tanah Ladang	Tanah Ladang		BENAR
10.	114.372988°E 8.261985°S	Kawasan Tambak	Kawasan Tambak		BENAR
11.	114.378932°E 8.250464°S	Kawasan Tambak	Kawasan Tambak		BENAR
12.	114.38128°E 8.227841°S	Kawasan Tambak	Kawasan Tambak		BENAR
13.	114.344151°E 8.245364°S	Perkebunan	Perkebunan		BENAR

NO.	Koordinat	GUNA LAHAN		Dokumentasi	Keterangan
		Citra satelit	Hasil Survey		
14.	114.365544°E 8.202215°S	Perkebunan	Pertanian		SALAH
15.	114.346257°E 8.235935°S	Perkebunan	Perkebunan		BENAR
16.	114.359233°E 8.250194°S	Permukiman	Permukiman		BENAR
17.	114.379981°E 8.203848°S	Permukiman	Permukiman		BENAR
18.	114.377106°E 8.194375°S	Permukiman	Permukiman		BENAR
19.	114.388824°E 8.237126°S	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai		BENAR

NO.	Koordinat	GUNA LAHAN		Dokumentasi	Keterangan
		Citra satelit	Hasil Survey		
20.	114.340986°E 8.231566°S	Pertanian	Pertanian		BENAR
21.	114.372911°E 8.232955°S	Pertanian	Pertanian		BENAR
22.	114.382226°E 8,209,852°S	Kawasan Perairan Payau	Pelabuhan Yacht		SALAH
23.	114.382348°E 8.203199°S	Kawasan Perairan Payau	Kawasan Perairan Payau		BENAR
24.	114.368684°E 8.261192°S	Tanah Ladang	Kawasan Tambak		SALAH
25.	114.35554°E 8.243916°S	Tanah Ladang	Tanah Ladang		BENAR

NO.	Koordinat	GUNA LAHAN		Dokumentasi	Keterangan
		Citra satelit	Hasil Survey		
26.	114.381952°E 8.21563°S	Kawasan Tambak	Kawasan Tambak		BENAR
27.	114.372478°E 8.242586°S	Perkebunan	Perkebunan		BENAR
28.	114.382276°E 8.235308°S	Permukiman	Permukiman		BENAR
29.	114.372673°E 8.265104°S	Sempadan Pantai	Sempadan Pantai		BENAR
30.	114.383435°E 8.206609°S	Pelabuhan Yacht	Pelabuhan Yacht		BENAR

(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan hasil ground check pada 30 titik pengecekan (Tabel 5.), didapatkan 27 titik yang sesuai antara kenampakan dari citra satelit pada peta dengan kenampakan yang ada di lapangan. Adapun 3 titik pengecekan lainnya tidak sesuai, yang mana pada kenampakan citra satelit pada peta merupakan tanah kadang,

pelabuhan yacht, dan pertanian, sedangkan kenampakan yang ada di lapangan adalah kawasan tambak, kawasan perairan payau, serta perkebunan. Hasil yang didapatkan pada kegiatan ground check kemudian digunakan untuk mencari tingkat akurasi peta pemanfaatan ruang wilayah pesisir eksisting di kecamatan Banyuwangi.

Uji akurasi merupakan langkah penting peneliti dalam pembuatan peta untuk mengetahui tingkat keakurasian peta yang dibuat antara analisis spasial citra satelit dengan keadaan yang ada di lapangan. Pengujian tingkat keakurasian pada penelitian ini menggunakan *overall accuracy*. Ketelitian Keseluruhan (Overall Accuracy) merupakan perbandingan jumlah total titik sampel hasil klasifikasi dengan jumlah titik sampel referensi (Badan Informasi Geospasial, 2014). Berikut merupakan hasil perhitungan uji akurasi pada peta pemanfaatan ruang wilayah pesisir eksisting di kecamatan Banyuwangi menggunakan persamaan *overall accuracy* :

$$\begin{aligned} \text{Overall Accuracy} &= \frac{27}{30} \times 100 \\ &= \mathbf{90\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan dari perhitungan uji akurasi menggunakan *overall accuracy* didapatkan nilai keakurasian sebesar 90%. Nilai ini menunjukkan tingkat keakurasian peta pemanfaatan ruang wilayah pesisir eksisting di kecamatan Banyuwangi memiliki tingkat akurasi yang tinggi, nilai ini berdasarkan ketentuan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar yakni >85% untuk uji ketelitian atribut penutupan lahan.

4.1.2. Pemanfaatan Ruang Laut Kecamatan Banyuwangi Tahun 2022

Berdasarkan hasil identifikasi peta pemanfaatan ruang laut eksisting Kecamatan Banyuwangi terdapat 6 zona pemanfaatan ruang laut. Berikut merupakan zona pemanfaatan ruang laut eksisting di Kecamatan Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 6.

Table 6. Zona Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting Kecamatan Banyuwangi tahun 2022

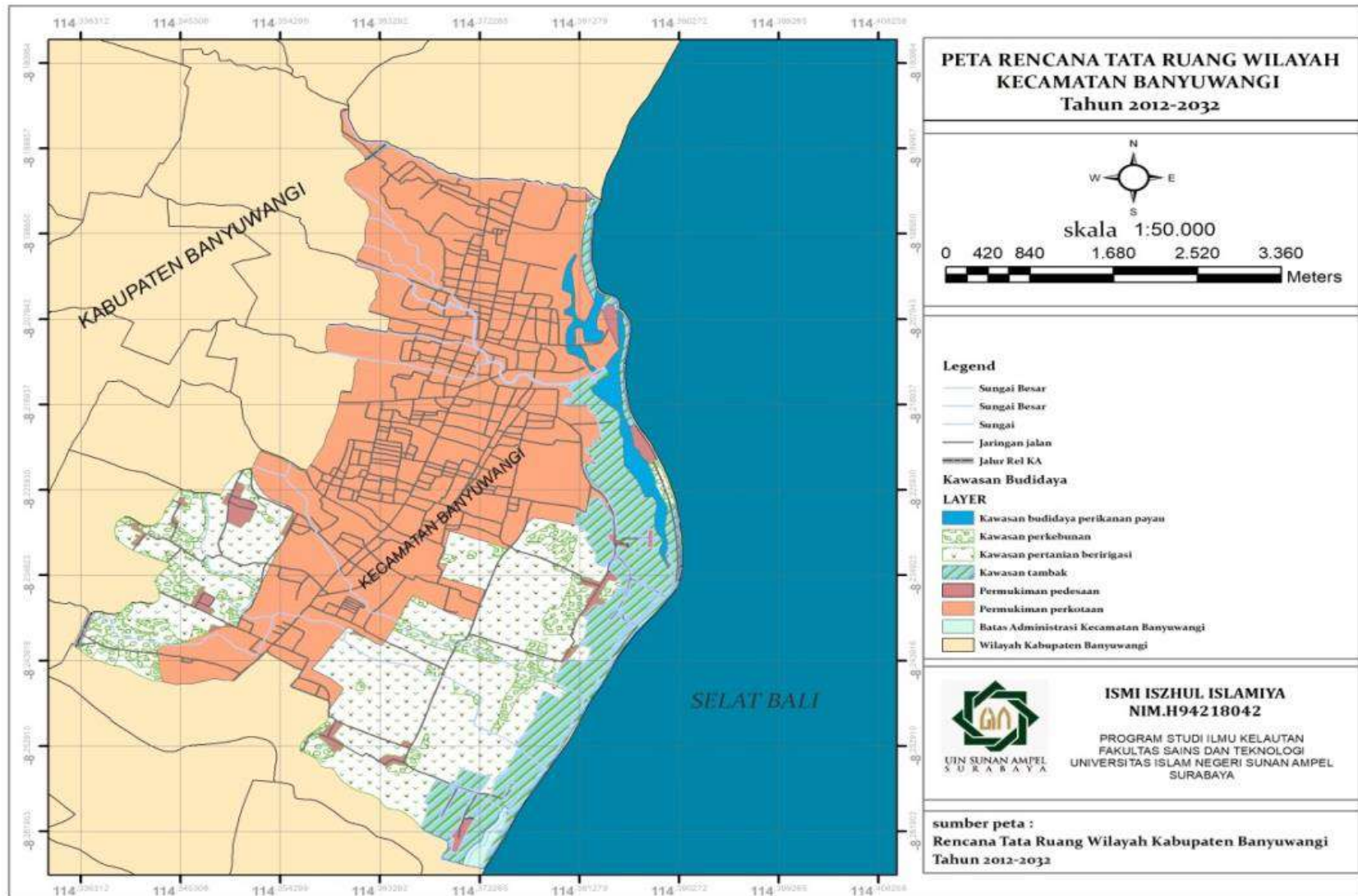
NO.	PEMANFAATAN RUANG LAUT	LOKASI
1	Lokasi Cemara	Pantai Cemara
2	Konservasi Penyu	
3	Pariwisata	Pantai Pulau Santen
4	Pelabuhan Khusus	
5	Lokasi Penyu	Pantai Boom
6	Pelabuhan Lokal	

Adapun 6 (enam) zona pemanfaatan ruang laut eksisting di Kecamatan Banyuwangi yang terbagi di 3 (tiga) lokasi Pantai yang disajikan dalam (Tabel 6.) yaitu Lokasi Cemara dan Konservasi Penyu yang berada di Pantai Cemara, Pariwisata dan Pelabuhan Khusus yang berlokasi di Pantai Pulau Santen, serta Lokasi Penyu dan Pelabuhan Lokal yang terletak di Kawasan Pantai Boom.

4.2. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K

4.2.1. Pola Ruang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012 - 2032.

Data spasial RTRW Kecamatan Banyuwangi didapatkan dari pemotongan data spasial RTRW Kabupaten Banyuwangi sesuai batas wilayah kecamatan Banyuwangi. Terdapat 18 Kelurahan pada kecamatan Banyuwangi yang merupakan wilayah penelitian ini. Ada 5 Kelas perencanaan tata ruang wilayah dalam RTRW Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012-2032 yang dijadikan acuan dalam analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir kecamatan Banyuwangi. Adapun gambaran perencanaan tata ruang wilayah dalam RTRW kecamatan Banyuwangi disajikan dalam bentuk peta pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Banyuwangi Tahun 2012-2032

(Sumber: PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012)

Berdasarkan data perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) kecamatan Banyuwangi didapatkan hasil luas masing-masing kelas, permukiman menjadi kelas perencanaan ruang wilayah yang memiliki nilai luasan tertinggi yakni sebesar 1400 Ha atau 54,1% dari total keseluruhan wilayah di Kecamatan Banyuwangi.

Tabel 7. Luas rencana tata ruang wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW

No.	Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Permukiman	1400.0	54.1
2	Kawasan Perkebunan	190.0	7.3
3	Kawasan Pertanian	614.0	23.7
4	Kawasan Tambak	307.0	11.9
5	Kawasan budidaya Air Payau	52.0	2.0
Total		2589.0	100.0

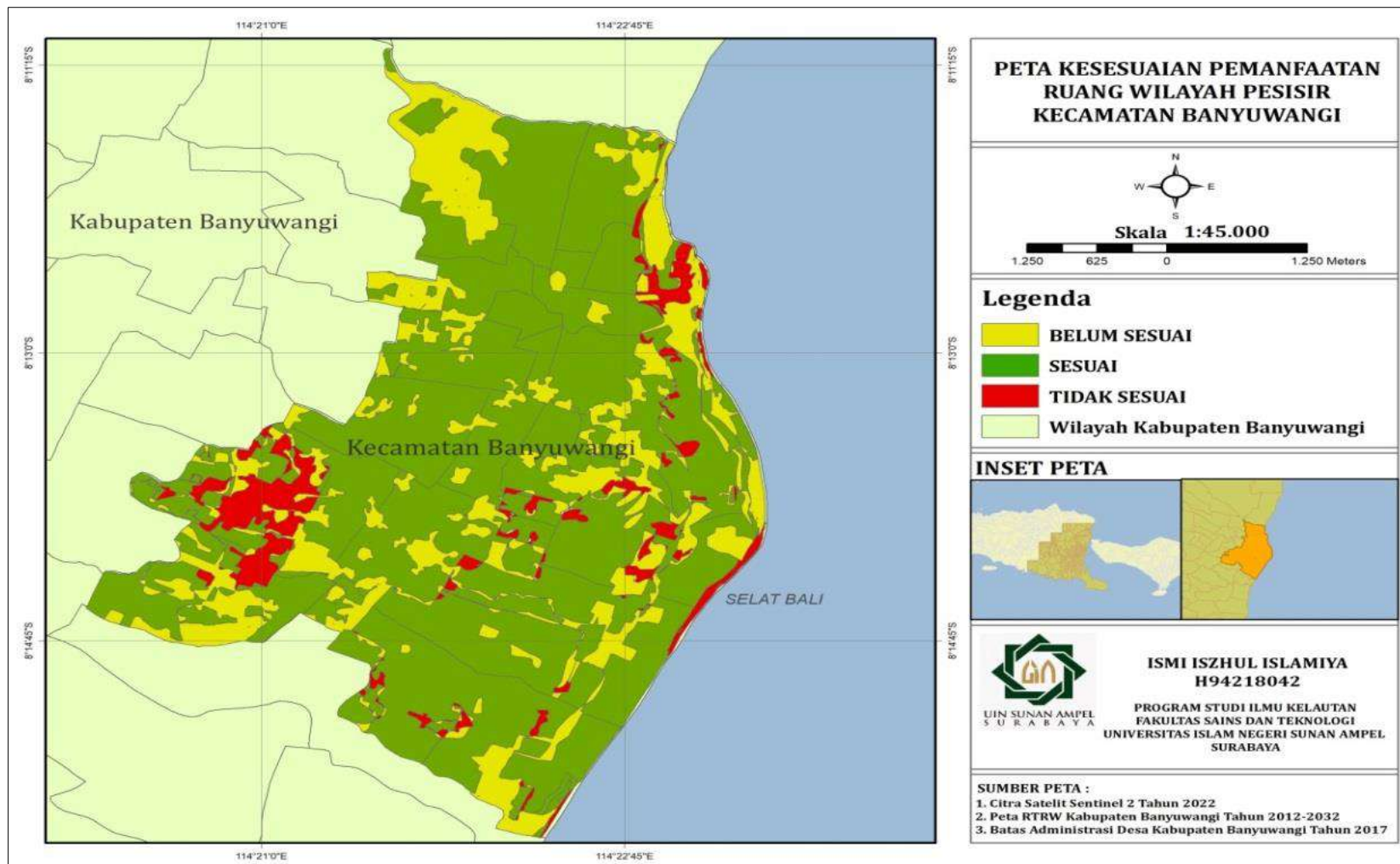
(Sumber: PERDA Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012)

Adapun 5 kelas rencana tata ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi yang disajikan dalam (Tabel 7.) yaitu permukiman, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan tambak, serta kawasan budidaya air payau. Berdasarkan (Tabel 7.) rencana tata ruang wilayah di kecamatan Banyuwangi dalam RTRW kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 dengan lahan terluas yaitu kawasan permukiman dengan luas 1400 Ha atau 54,1% dari seluruh lahan yang ada di kecamatan Banyuwangi. kelas selanjutnya dengan lahan terluas kedua adalah kawasan pertanian dengan luas 614 Ha atau 23,7%. Adapun luas dari 3 (Tiga) kelas lainnya yakni kawasan tambak seluas 307 Ha atau 11,9%, lahan seluas 190 Ha atau 7,3% diperuntukan untuk kawasan perkebunan, serta kawasan budidaya perairan payau dengan luas lahan yang diperuntukan sebesar 52 Ha atau 2% dari total lahan di Kecamatan Banyuwangi.

4.2.2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir berdasarkan RTRW di Kecamatan Banyuwangi

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan menggunakan overlay antara peta eksisting pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Banyuwangi dengan Peta RTRW Kecamatan Banyuwangi. Hasil overlay kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 disajikan dalam peta pada (Gambar 9.).





Gambar 9. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting Berdasarkan RTRW di Kecamatan Banyuwangi
(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan hasil overlay kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap RTRW di Kecamatan Banyuwangi (*Gambar 9.*), dapat dilihat bahwa ada 3 (Tiga) warna yang berada pada peta kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Banyuwangi, yakni warna merah untuk wilayah yang tidak sesuai, warna kuning untuk wilayah yang belum sesuai, serta warna hijau untuk wilayah yang sesuai antara peta eksisting dengan peta RTRW di Kecamatan Banyuwangi. Adapun luasan masing-masing wilayah kesesuaian pada setiap kelas pemanfaatan wilayah pesisir disajikan dalam (*Tabel.8*).

Tabel 8. analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

Keterangan	Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
TIDAK SESUAI	Permukiman	143	5.39
	Pelabuhan Yacht	16	0.60
	Perkebunan	10	0.38
	Sempadan Pantai	16	0.60
BELUM SESUAI	Perairan Payau	8	0.30
	Perkebunan	332	12.50
	Pertanian	113	4.26
	Kawasan Tambak	50	1.88
	Sempadan Pantai	2	0.08
	Tanah Ladang	83	3.13
SESUAI	Permukiman	1055	39.74
	Perairan Payau	20	0.75
	Perkebunan	102	3.84
	Pertanian	479	18.04
	Kawasan Tambak	227	8.55

(Sumber: Olah Data, 2022)

Menurut (*Tabel.8*) mengenai analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, Ada 4 kelas pemanfaatan ruang wilayah yang berada pada kategori tidak sesuai antara peta eksisting dengan peta rencana tata ruang wilayah (RTRW) kecamatan Banyuwangi yakni: Pemukiman, Pelabuhan Yacht, Perkebunan, dan Sempadan Pantai. Permukiman menempati urutan pertama dengan luas wilayah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sebesar 143 Ha atau sebanyak 5,39%. Urutan kedua adalah pelabuhan yacht dan sempadan pantai dengan masing-masing luas wilayah yang tidak sesuai yakni 16 Ha atau 0,60%. Sedangkan, untuk kelas

pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan luas terkecil adalah perkebunan dengan luas 10 Ha atau 0,38%.

Pemanfaatan ruang wilayah di Kecamatan Banyuwangi yang belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyuwangi adalah perairan payau, pertanian, perkebunan, kawasan tambak, tanah ladang, serta sempadan pantai. Perkebunan menjadi pemanfaatan ruang wilayah yang belum sesuai dengan luas wilayah terbesar di kecamatan Banyuwangi yakni seluas 332 Ha atau 12,50%. Selanjutnya ada pertanian dengan luas wilayah yang belum sesuai adalah 113 Ha atau 4,26%, Tanah ladang dengan luas 83 Ha atau 3,13%, pemanfaatan ruang wilayah sebagai Kawasan tambak yang tidak sesuai dengan RTRW seluas 50 Ha atau sebesar 1,88%, dan pemanfaatan ruang wilayah sebagai perairan payau dan sempadan pantai memiliki luas wilayah yang belum sesuai dengan RTRW sebesar 8 Ha dan 2 Ha atau 1,88% dan 0,08%.

Berdasarkan (Tabel.8), hanya ada 5 kelas Pemanfaatan ruang wilayah di kecamatan Banyuwangi yang telah sesuai dengan rencan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi dari total 8 kelas yang terklasifikasi. Permukiman menjadi pemanfaatan ruang wilayah terluas yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dengan luas 1055 Ha, atau 39,70% dari total luas keseluruhan pemanfaatan ruang wilayah di Kecamatan Banyuwangi baik yang sesuai, belum sesuai, maupun tidak sesuai. Adapun 4 kelas Pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi yakni kawasan pertanian dengan luas 479 Ha atau 18,04%; kawasan tambak dengan luas 227 Ha atau 8,55%; Perkebunan dengan wilayah yang sesuai seluas 102 Ha atau 3,84%; dan kawasan perairan payau dengan luas 20 Ha atau 0,75%.

Tabel 9. Luas Total Kesesuaian Pemanfaatn Ruang Wilayah Pesisir di Kecamatan Banyuwangi

ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PESISIR			
NO.	KETERANGAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
1	TIDAK SESUAI	185	7.0
2	BELUM SESUAI	588	22.1
3	SESUAI	1883	70.9
TOTAL		2656	100.0

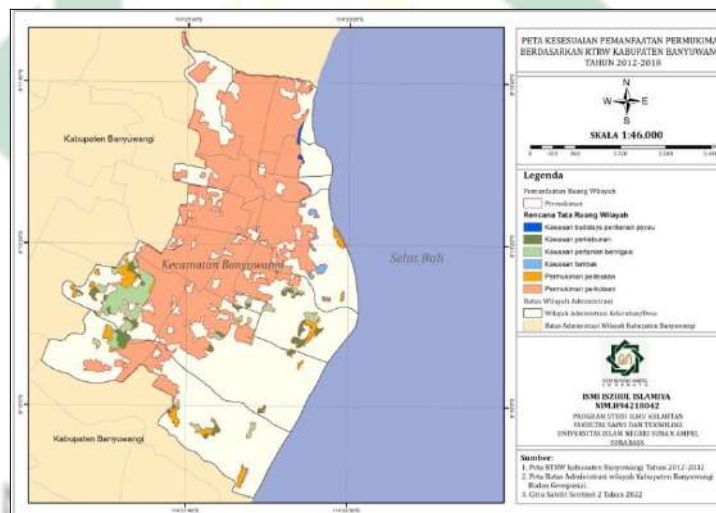
(Sumber: Olah Data, 2022)

Total luas lahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi adalah 2656 Ha atau 26,56 km² (Tabel.9). Terdapat 3 bagian wilayah pemanfaatan yang dikelompokkan berdasarkan kesesuaian antara peta eksisting pemanfaatan ruang wilayah pesisir dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kecamatan Banyuwangi yakni wilayah pemanfaatan yang tidak sesuai, belum sesuai, serta wilayah pemanfaatan yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan (Tabel.9), lebih dari 50% pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Wilayah pemanfaatan ruang seluas 1883 Ha atau 70,9% di Kecamatan Banyuwangi telah sesuai dengan RTRW, sedangkan luas wilayah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai sebesar 185 Ha atau 7% dari total luas lahan pemanfaatan.

Adapun 22,1% wilayah pemanfaatan ruang di Kecamatan Banyuwangi masih belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), lahan seluas 588 Ha ini masih dapat berubah menjadi wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW. Belum sesuainya pemanfaatan ruang wilayah dengan rencatan tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi ini dapat terjadi akibat lama periode RTRW yang masih berjalan separuh dari total periode yakni 2012 hingga 2032. Masih terisa 10 tahun kedepan untuk pembangunan wilayah Kecamatan Banyuwangi dengan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah hingga periode RTRW kabupaten Banyuwangi berakhir. Kecamatan Banyuwangi yang merupakan ibukota tentunya akan terus mengalami pembangunan, hal ini guna meningkatkan fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di PERDA Kab. Banyuwangi No.1 Tahun 2012. Adapun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kecamatan Banyuwangi perlu di tinjau kembali oleh pemerintah Kabupaten, hal ini perlu dilakukan guna menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

4.2.2.1. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Permukiman Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (*Tabel.7*), kawasan permukiman menjadi rencana pemanfaatan ruang dengan lahan terluas yakni sebesar 1400 Ha atau 54,1% dari seluruh luas wilayah Kecamatan Banyuwangi. Luas lahan yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman di Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2022 yakni sebesar 1197 Ha atau 45,08% dari seluruh wilayah di Kecamatan Banyuwangi (*Tabel.4*). Kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah sebagai kawasan permukiman dilakukan dengan menggunakan metode overlay peta, kemudian analisis kesesuaian disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut (*Gambar.11*).



Gambar 10. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Pertanian
(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah sebagai kawasan permukiman (*Gambar.11*), lahan seluas 1055 Ha atau 88% dari total lahan yang telah termanfaatkan sebagai permukiman di Kecamatan Banyuwangi telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Adapun, 12% sisa lahan dari seluruh lahan yang termanfaatkan sebagai kawasan permukiman atau lahan dengan luas 142 Ha tidak sesuai dengan perencanaan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Permukiman

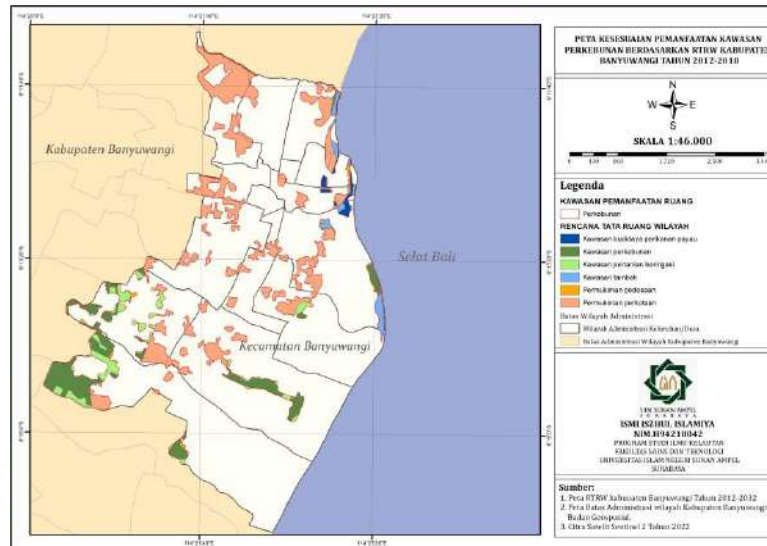
No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Permukiman	Kawasan perkebunan	18.9	36	3.0
2	Permukiman	Kawasan Budidaya perairan payau	7.7	4	0.3
3	Permukiman	kawasan Tambak	4.2	13	1.1
4	Permukiman	Permukiman	75.4	1055	88.1
5	Permukiman	Kawasan Pertanian	14.5	89	7.4
Total Luas				1197	100

(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan (Tabel.10), ada 4 rencana pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi yang mengalami alih fungsi lahan yakni Kawasan perkebunan dengan luas 36 Ha, Kawasan budidaya perairan payau seluas 4 Ha, kawasan tambak seluas 13 Ha, serta kawasan pertanian dengan luas lahan 89 Ha. Menurut (Agung et al., 2018), Peningkatan laju pertumbuhan penduduk perkotaan akan mengakibatkan peningkatan pembangunan perkotaan salah satunya dengan pemanfaatan lahan sebagai permukiman. Berdasarkan BPS Kabupaten Banyuwangi, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banyuwangi pada 10 tahun terakhir meningkat 1,04% (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2022).

4.2.2.2. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Perkebunan Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Kawasan perkebunan merupakan kawasan pemanfaatan ruang di Kecamatan Banyuwangi dengan lahan terluas ketiga setelah permukiman dan pertanian (Tabel.4). Total luas lahan kawasan perkebunan yakni sebesar 444 Ha. Dari total lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan, hanya 23% lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyuwangi. seluas 332 Ha atau 75% lahan di kawasan perkebunan masih belum sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah di Kecamatan Banyuwangi. Sedangkan, lahan selus 10 Ha yang telah termanfaatkan sebagai kawasan perkebunan termasuk wilayah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.



Gambar 11. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Perkebunan (Sumber: Olah Data, 2022)

Berikut merupakan hasil overlay peta eksisting pemanfaatan ruang sebagai kawasan perkebunan di kecamatan Banyuwangi dengan peta rencana tata ruang wilayah yang disajikan dalam (Tabel.11):

Tabel 11. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Perkebunan

No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Perkebunan	Permukiman	19.2	269	60.6
2	Perkebunan	Kawasan Perkebunan	53.7	102	23.0
3	Perkebunan	kawasan Tambak	5.5	17	3.8
4	Perkebunan	Kawasan Budidaya Perairan Payau	19.2	10	2.3
5	Perkebunan	Kawasan Pertanian	7.5	46	10.4
Total Luas				444	100

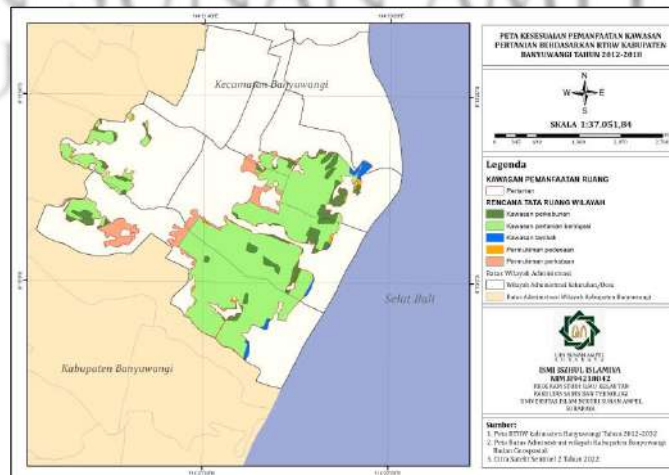
(Sumber: Olah Data, 2022)

Luas pemanfaatan lahan sebagai kawasan perkebunan di Kecamatan Banyuwangi yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 yakni sebesar 102 Ha (Tabel.11). Nilai ini mencapai 23 % dari keseluruhan lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan. Beberapa luas Kawasan perkebunan ini masih berpotensi untuk dilakukan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi yang telah disusun untuk kurun waktu 20 tahun yakni dari 2012 hingga 2032.

Berdasarkan RTRW kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, lahan seluas 269 Ha atau 60,6% lahan yang masih dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan diperuntukan untuk kawasan permukiman. Selain kawasan permukiman, Adapun beberapa rencana pemanfaatan lahan yang kini masih dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan antara lain kawasan tambak dengan luas 17 Ha, serta Kawasan Pertanian seluas 46 Ha. Sedangkan, lahan seluas 19 Ha yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan perkebunan tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah yakni sebagai kawasan budidaya perairan payau. Hal ini di karenakan lokasi lahan yang tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya perairan payau, sehingga dialih fungsikan sebagai kawasan perkebunan yang juga diharapkan membawa manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.

4.2.2.3. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Pertanian Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan pertanian di kecamatan banyuwangi berdasarkan RTRW kabupaten banyuwangi Tahun 2012-2032 disajikan dalam (*Gambar.13*). Berdasarkan hasil tersebut, lahan seluas 479 Ha di kawasan pertanian telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi. sedangkan, sisa lahan seluas 114 Ha di Kawasan pertanian masih belum sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 12. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Pertanian
(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 rencana pemanfaatan lahan yang kini masih dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian yakni kawasan tambak, kawasan perkebunan, serta kawasan permukiman (*Tabel.12*). Lahan terluas ada pada rencana pemanfaatan ruang sebagai kawasan perkebunan yakni seluas 57 Ha, kemudian perencanaan sebagai kawasan permukiman seluas 48 Ha. Sedangkan, kawasan tambak menjadi rencana pemanfaatan ruang dengan luas lahan terkecil yakni seluas 9 Ha.

Tabel 12. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Pertanian

No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Pertanian	Permukiman	3.3	48	8.1
2	Pertanian	Kawasan Pertanian Beririgasi	77.4	479	80.8
3	Pertanian	Kawasan Tambak	2.9	9	1.5
4	Pertanian	Kawasan Perkebunan	29.5	57	9.6
Total Luas				593	100

(sumber: Olah Data, 2022)

Pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan pertanian di Kecamatan Banyuwangi memiliki luas lahan yang cukup luas dengan total lahan seluas 593 Ha (*Tabel.12*). Hal ini menunjukkan bahwa 22,34 % lahan di wilayah kecamatan Banyuwangi merupakan kawasan pertanian. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, perencanaan lahan yang diperuntukan sebagai kawasan pertanian yakni seluas 614 Ha atau 23 % dari seluruh lahan di Kecamatan Banyuwangi. Pertanian adalah salah satu sektor dengan prioritas dalam pendapatan masyarakat, hal ini turut menjadikan sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang menopang pembangunan di suatu wilayah (Lamusa et al., 2015). Berdasarkan penelitian (Jauhariyah & Inayah, 2016), sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi sehingga memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan kota. Perencanaan lahan seluas 614 Ha yang diperuntukan untuk kawasan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten dalam pembangunan wilayah sebagai ibukota Kabupaten.

4.2.2.4. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Tambak Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

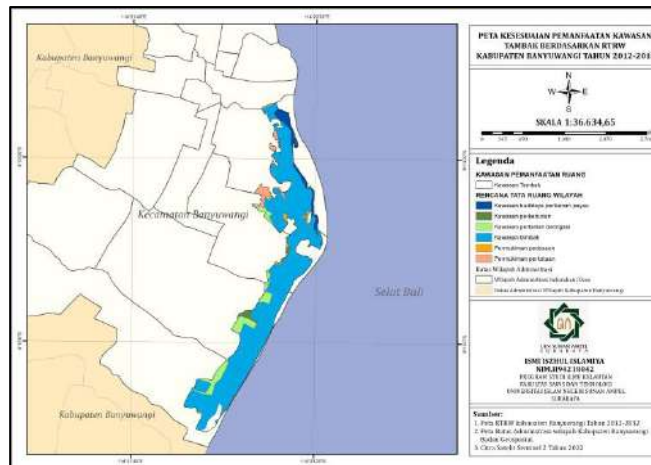
Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan tambak di kecamatan dilakukan dengan melakukan overlay pada peta pemanfaatan ruang eksisting dengan peta rencana tata ruang wilayah di kabupaten Banyuwangi. Adapun hasil yang didapatkan dari analisis kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai kawasan tambak adalah sebagai berikut (*Tabel.13*):

Tabel 13. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Kawasan Tambak

No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Kawasan Tambak	Kawasan Tambak	73.9	227	81.9
2	Kawasan Tambak	Kawasan Pertanian	3.4	21	7.6
3	Kawasan Tambak	Permukiman	0.9	12	4.3
4	Kawasan Tambak	Kawasan perkebunan	2.1	4	1.4
5	Kawasan Tambak	Kawasan budidaya perairan payau	25.0	13	4.7
Total Luas				277	100

(Sumber: Olah Data, 2022)

Pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan tambak di kecamatan Banyuwangi memiliki luas lahan sebesar 277 Ha. Luas lahan yang telah sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi yakni sebagai kawasan pertambakan yakni sebesar 227 Ha atau 81,9% dari keseluruhan luas lahan yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan tambak. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, lahan seluas 21 Ha yang berada di kawasan tambak diperuntukan untuk kawasan pertanian. selain kawasan pertanian, terdapat 12 Ha lahan yang diperuntukan untuk pembangunan kawasan permukiman, 13 Ha lahan yang direncanakan akan di manfaatkan sebagai kawasan budidaya perairan payau, serta lahan dengan luas 4 Ha yang diperuntukan sebagai kawasan perkebunan.



Gambar 13. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Tambak
(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 82 % total lahan yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan tambak telah sesuai dengan RTRW. Adapun 18 % lainnya masih belum sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyuwangi khususnya di wilayah kecamatan Banyuwangi. Budidaya tambak merupakan salah satu sektor perikanan yang unggul di kabupaten banyuwangi. Menurut (Richard,2022), Banyuwangi menjadi salah satu kantong utama ekspor udang vannamei yang berasal dari Jawa Timur. Hal ini terlihat dari naiknya angka ekspor udang dan ikan pada tahun 2020 dengan angka kenaikan mencapai 3,33% dari tahun sebelumnya. Tingginya angka permintaan komitas tambak terutama udang menjadikan para petani tambak di Banyuwangi bersemangat dalam membudidayakan udang. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya tambak memberikan dampak baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah, perencanaan lahan sebagai kawasan tambak menjadi salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

4.2.2.5. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Perairan Payau Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

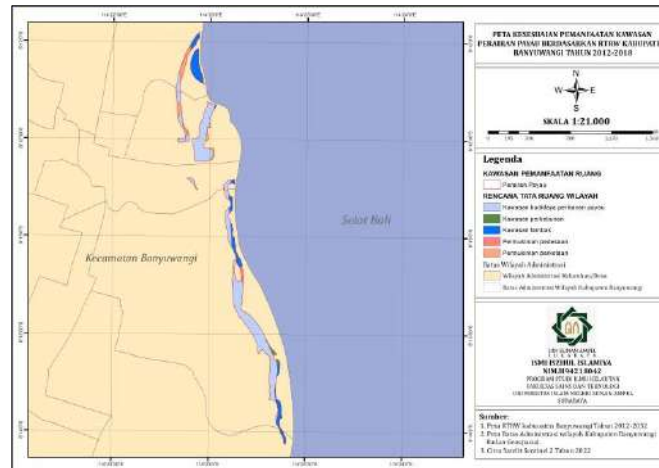
Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan perairan payau di kecamatan banyuwangi berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 yakni sebagai berikut(Tabel.14):

Tabel 14. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Kawasan Perairan Payau

No	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Kawasan Perairan Payau	Kawasan Tambak	1.6	5	17.9
2	Kawasan Perairan Payau	Kawasan Budidaya Perairan Payau	38.5	20	71.4
3	Kawasan Perairan Payau	Permukiman	0.1	2	7.1
4	Kawasan Perairan Payau	Kawasan Perkebunan	0.5	1	3.6
Total Luas				28	100

(Sumber: Olah Data, 2022)

Lahan seluas 28 Ha di Kecamatan Banyuwangi telah menjadi kawasan perairan payau, dengan 20 Ha lahan atau 71,4 % dari keseluruhan lahan kawasan perairan payau telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah(RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Sedangkan, lahan seluas 8 Ha atau 29 % lahan yang berada di kawasan perairan payau belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah(RTRW) Kabupaten Banyuwangi, lahan dengan luas 8 Ha yang menjadi kawasan perairan payau di peruntukkan sebagai kawasan tambak, kawasan permukiman, serta kawasan perkebunan. Kawasan tambak dengan lahan sebesar 5 Ha atau 17,9 % dari total lahan di kawasan perairan payau, lahan seluas 2 Ha diperuntukkan untuk kawasan permukiman, serta kawasan perkebunan dengan lahan seluas 1 Ha atau 3,6 % dari keseluruhan lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan perairan payau. Adapun gambaran kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah sebagai kawasan perairan payau berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi disajikan dalam (*Gambar.15*) :



Gambar 14. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Perairan Payau
(Sumber: Olah Data, 2022)

4.2.2.6. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Tanah Ladang Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

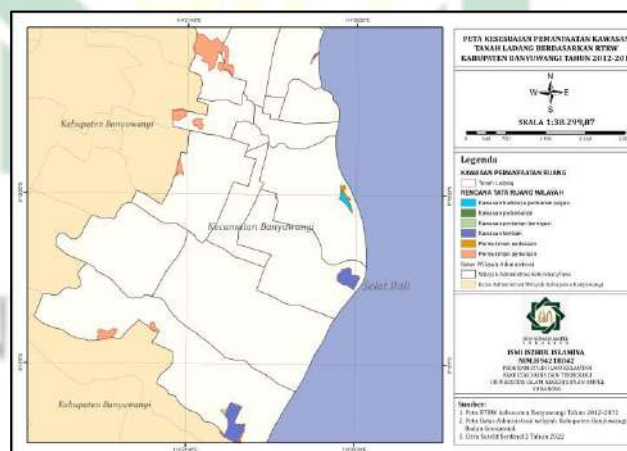
Penginterpretasian objek pada citra satelit sentinel 2 pada penelitian ini mendapatkan hasil adanya lahan yang dari bentuk, warna, serta pola nya merupakan tanah ladang atau lahan yang belum dimanfaatkan sebagai kawasan apapun. Berikut merupakan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan tanah ladang di Kecamatan Banyuwangi:

Tabel 15. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Tanah Ladang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir

No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir		Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW		
1	Tanah Ladang	Permukiman	2.9	51.8
2	Tanah Ladang	Kawasan Tambak	10.1	38.6
3	Tanah Ladang	Kawasan Perkebunan	1.6	3.6
4	Tanah Ladang	Kawasan Pertanian	0.2	2.4
5	Tanah Ladang	Kawasan budidaya perairan payau	5.8	3.6
Total Luas			83	100

(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, terdapat 5 perencanaan pemanfaatan lahan yang ada di wilayah kecamatan Banyuwangi yakni sebagai kawasan permukiman, kawasan tambak, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, serta kawasan budidaya perairan payau. Lahan sebagai kawasan permukiman memiliki luas sebesar 43 Ha atau 52 % dari total luas lahan tanah ladang, lahan seluas 32 Ha sebagai Kawasan Tambak, lahan seluas 2 Ha menjadi kawasan pertanian, serta 6 Ha lahan diperuntukan sebagai Kawasan perkebunan dan Kawasan budidaya perairan payau dengan masing-masing lahan seluas 3 Ha. Tanah ladang merupakan lahan yang umumnya digunakan sebagai padang rumput atau kandang ternak, namun tanah ladang juga dapat berasal dari lahan sisa yang belum termanfaatkan sehingga menjadi lahan kosong. Hal ini menunjukkan bahwa lahan dengan luas 83 Ha atau 3,13 % dari total lahan yang ada di Kecamatan Banyuwangi belum sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Berikut merupakan gambaran kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai kawasan tanah ladang berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi (*Gambar.16*):



Gambar 15. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Tanah Ladang
(Sumber: Olah Data, 2022)

4.2.2.7. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan Pelabuhan Yacht Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

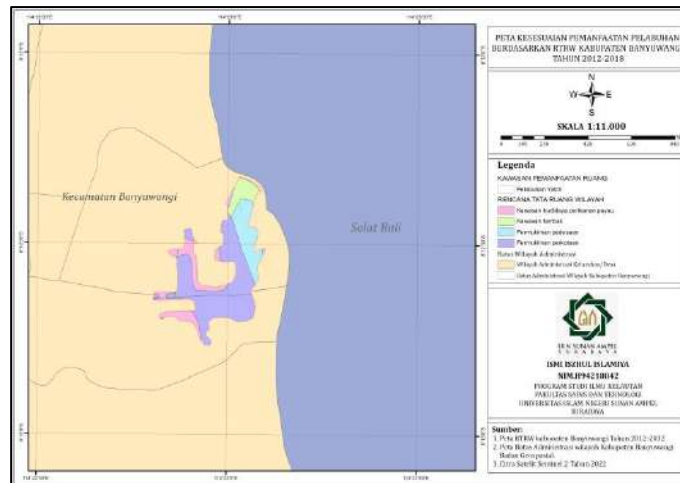
Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting di Kecamatan Banyuwangi sebagai kawasan Pelabuhan berdasarkan dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 16. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Pelabuhan Yacht

No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Pelabuhan Yacht	Permukiman	0.9	13	92.9
2	Pelabuhan Yacht	Kawasan Tambak	0.3	1	7.1
3	Pelabuhan Yacht	Kawasan Budidaya Perairan Payau	3.8	2	14.28571
Total Luas				16	100

(Sumber: Olah Data, 2022)

Hasil analisis menunjukkan bahwa luas lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan pelabuhan yakni sebesar 16 Ha (*Tabel.16*). Berdasarkan tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, lahan seluas 16 Ha yang telah menjadi kawasan pelabuhan diperuntukan sebagai kawasan permukiman, tambak, serta kawasan budidaya perairan payau. Kawasan permukiman dengan rencana pemanfaatan lahan terluas yakni sebesar 13 Ha, sedangkan yang terkecil yakni 1 Ha sebagai kawasan tambak. Adapun gambaran kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah sebagai kawasan pelabuhan berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi disajikan dalam gambar.17 :

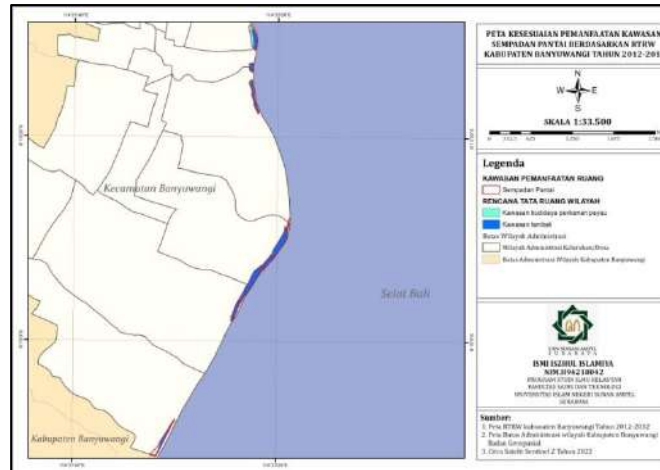


Gambar 16. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Pelabuhan
(Sumber: Olah Data, 2022)

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan sebagai pelabuhan di kecamatan Banyuwangi tidak sesuai dengan perencanaan pemanfaatan lahan yang ada pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Pelabuhan marina ini terletak di kawasan Pantai Boom Marina yang berada di Kelurahan Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Pembangunan pelabuhan dilakukan pada tahun 2015 diatas aset milik PT Pelindo III dan dikelola anak perusahaan PT Pelindo Properti Indonesia. Pengalihan fungsi lahan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai pelabuhan yacht yang terjadi di kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan tujuan untuk pembangunan daerah melalui sektor wisata.

4.2.2.8. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sebagai Kawasan sempadan Pantai Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Kecamatan Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang termasuk kedalam wilayah pesisir (Sukandar et al., 2016). Lokasi kecamatan banyuwangi menjadi salah satu wilayah batas timur Kabupaten Banyuwangi yang berhadapan langsung dengan Selat Bali. Hal ini menjadikan kecamatan Banyuwangi memiliki banyak kawasan sempadan pantai. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang telah dilakukan, kawasan sempadan pantai di kecamatan Banyuwangi telah banyak yang telah dimanfaatkan sebagai area wisata antara lain yakni Pantai Cemara, Pantai Pulau Santen, dan Pantai Boom. Berikut merupakan gambaran kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai kawasan sempadan pantai berdasarkan RTRW :



Gambar 17. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Sebagai Kawasan Sempadan Pantai (Sumber: Olah Data, 2022)

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai kawasan sempadan pantai di Kecamatan Banyuwangi yang dilihat berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2022 disajikan dalam (Tabel.17). kawasan sempadan pantai di kecamatan Banyuwangi memiliki luas 18 Ha atau 0,68% dari seluruh lahan di Kecamatan Banyuwangi (Tabel.4). Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan ruang eksisting kawasan sempadan pantai (Tabel.17), terlihat bahwa pemanfaatan eksisting kawasan sempadan pantai pada dasarnya diperuntukan untuk kawasan tambak dan kawasan budidaya perairan payau.

Tabel 17. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah kelas Kawasan Sempadan Pantai

No.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir			Luas (Ha)	Persentase (%)
	Eksisting	RTRW	Persentase alih fungsi lahan		
1	Sempadan Pantai	Kawasan Tambak	5.2	16	88.9
2	Sempadan Pantai	Kawasan Budidaya Perairan Payau	3.8	2	11.1
Total Luas				18	100

(Sumber: Olah Data, 2022)

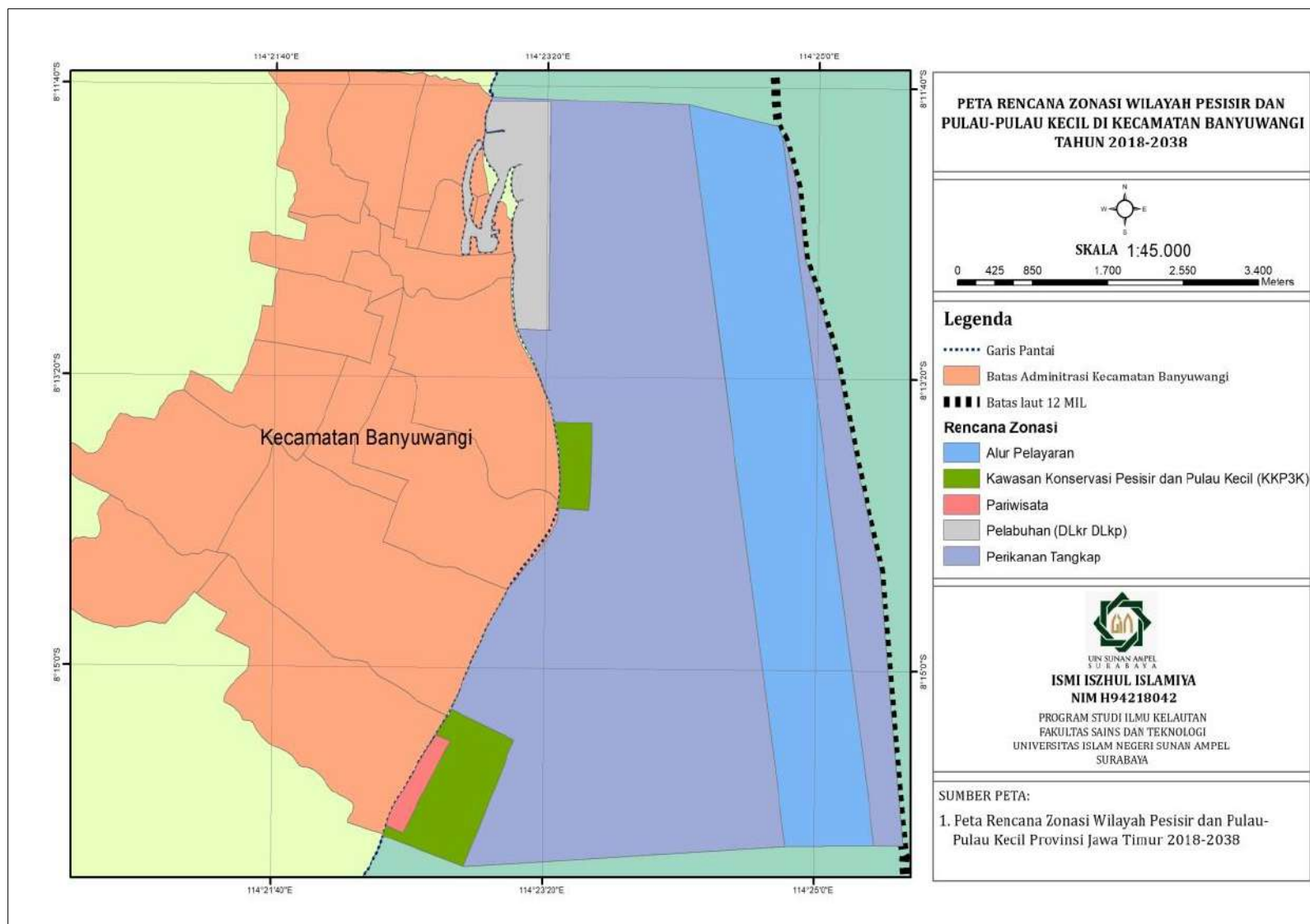
Menurut rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi, Lahan seluas 16 Ha yang telah menjadi kawasan sempadan pantai diperuntukan sebagai kawasan tambak. Sedangkan, lahan dengan luas 2 Ha diperuntukan sebagai kawasan budidaya perairan payau. Hal ini tentunya menjadikan pemanfaatan ruang eksisting sebagai kawasan sempadan pantai belum sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Perubahan

pemanfaatan lahan masih dapat terjadi pada kurun waktu 10 tahun kedepan sampai masa berlakunya RTRW kabupaten Banyuwangi selesai.

4.2.3. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3- K) Kecamatan Banyuwangi Tahun 2018-2038

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan rencana alokasi ruang laut pada batas 0 - 12 mil yang diperuntukan sesuai dengan sumberdaya serta kegiatan yang diperbolehkan pada setiap zona yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Adapun gambaran Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) di kecamatan Banyuwangi disajikan dalam bentuk peta pada Gambar 19.





Gambar 18. Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2018-2038

(Sumber: PERDA Provinsi Jawa Timur nomor 1 Tahun 2018)

Berdasarkan identifikasi data Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur didapatkan 5 Kelas perencanaan tata ruang laut dalam RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2018-2038 yang dijadikan acuan dalam analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut kecamatan Banyuwangi. Berikut merupakan hasil dari Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) di Kecamatan Banyuwangi Tahun 2018-2038.

Table 18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kecamatan Banyuwangi

no	Rencana Zonasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K)	145	4.54
2	Pelabuhan (DLkr DLkp)	139	4.35
3	Pariwisata	23	0.72
4	Perikanan Tangkap	2107	66.01
5	Alur Pelayaran	778	24.37
Total		3192	100.0

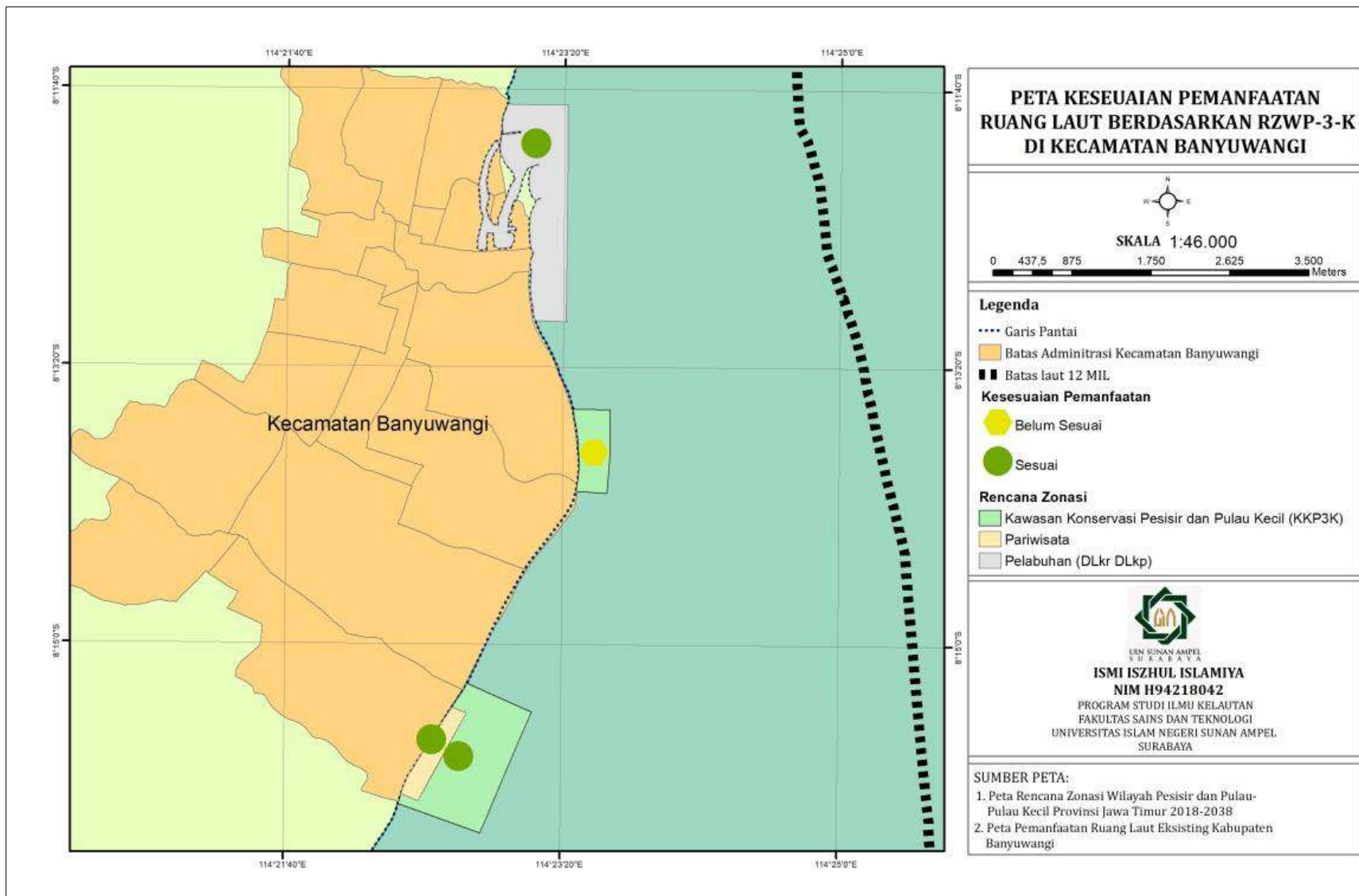
(Sumber: PERDA Provinsi Jawa Timur nomor 1 Tahun 2018)

Adapun 5 zona rencana zonasi ruang laut di Kecamatan Banyuwangi yang disajikan dalam (Tabel 18.) yakni Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Pelabuhan (DLkr DLkp), Pariwisata, Perikanan Tangkap, serta Alur Pelayaran. Berdasarkan (Tabel 18.) perencanaan zonasi ruang laut di kecamatan Banyuwangi di dominasi oleh wilayah perikanan tangkap dengan luas 2107 Ha atau 66,01% dari total luas wilayah perairan di kecamatan Banyuwangi. sedangkan, untuk perencanaan zonasi ruang laut lainnya adalah Alur pelayaran seluas 778 Ha atau sebesar 24,37%, rencana zonasi sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP-3-K) dengan luas perairan 145 Ha atau sebesar 4,54%, perairan dengan luas 139 Ha atau sebesar 4,35% diperuntukan sebagai pelabuhan atau zona DLkr dan DLkp, serta adapun perencanaan zonasi ruang laut dengan luas terkecil yakni sebesar 23 Ha atau 0,725 sebagai kawasan pariwisata. Zonasi ruang laut ini berlokasi di 3 (tiga) pantai yang ada di Kecamatan Banyuwangi yaitu Pantai Cemara, Pantai Pulau Santen, dan Pantai Boom.

4.2.4. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Eksisting berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi

Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan menggunakan peta eksisting pemanfaatan ruang laut Kecamatan Banyuwangi dengan Peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) di Kecamatan Banyuwangi. Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 disajikan dalam peta pada (gambar.20).





Gambar 19. Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi

(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi (*Gambar.17*), dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) titik dengan warna yang berbeda pada peta kesesuaian pemanfaatan ruang laut Kecamatan Banyuwangi, yakni warna kuning untuk wilayah yang belum sesuai, serta warna hijau untuk wilayah yang sesuai antara peta eksisting dengan peta RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi. Adapun luasan masing-masing wilayah kesesuaian pada setiap kelas pemanfaatan ruang laut disajikan dalam (*Tabel.19*).

Tabel 19. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi

Keterangan	Zona Pemanfaatan	Lokasi
SESUAI	Lokasi Cemara	Pantai Cemara
	Konservasi Penyu	
	Lokasi Penyu	Pantai Boom
	Pelabuhan Lokal	
BELUM SESUAI	Pariwisata	Pantai Pulau Santen
	Pelabuhan Khusus	

(*Sumber: Olah Data, 2022*)

Menurut analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2038 (Tabel. 19), terdapat Ada 4 zona pemanfaatan ruang laut yang berada pada kategori sesuai antara peta eksisting dengan peta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) di kecamatan Banyuwangi yakni: Lokasi Cemara, Konservasi Penyu, Lokasi Penyu, serta pelabuhan lokal. Masing-masing zona pemanfaatan ruang laut tersebut berada di 2 (dua) pantai yaitu Pantai Cemara dan Pantai Boom. Adapun zona yang belum sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) di kecamatan Banyuwangi adalah kawasan pariwisata dan pelabuhan khusus yang terletak di Pantai Pulau Santen.

Dari 6 zona pemanfaatan ruang laut di kecamatan Banyuwangi 4 diantaranya telah sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K), hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% rencana zonasi ruang laut di wilayah Kecamatan Banyuwangi telah sesuai dengan rencana zonasi yang ada. Adapun 2 zona

pemanfaatan ruang laut yang belum sesuai dikarenakan perlunya proses pengalihan dari kawasan pariwisata dan pelabuhan khusus menjadi zona yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) yaitu sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K). dimana wisata Pantai Pulau Santen menjadi salah satu penunjang perekonomian bagi masyarakat setempat.

4.2.4.1. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Sebagai kawasan konservasi penyu dan Lokasi Cemara Berdasarkan RZWP-3-K Prov. Jawa Timur Tahun 2018-2038.

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut sebagai kawasan konservasi penyu serta lokasi cemara berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kecamatan Banyuwangi ditampilkan pada Tabel 20. sebagai berikut:

Tabel 20. Analisis kesesuaian Pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan konservasi penyu dan lokasi cemara berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi

No.	Pemanfaatan Ruang Laut		Lokasi	Keterangan
	Eksisting	RZWP-3-K		
1	Lokasi Cemara	Pariwisata	Pantai Cemara	Sesuai
2	Konservasi Penyu	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K)		

Menurut Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2038 di wilayah kecamatan Banyuwangi tepatnya di lokasi Pantai Cemara diperuntukan untuk zona Pariwisata serta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil (KKP-3-K), hal ini telah sesuai dengan pemanfaatan ruang laut eksisting yang ada di pantai Cemara. Adapun pemanfaatan ruang laut eksisting atau pemanfaatan ruang laut yang telah terjadi di lapangan yakni telah digunakan sebagai lokasi cemara udang serta konservasi penyu. Pantai Cemara yang terletak di Dusun Rowo, Desa Pakis, Kecamatan Banyuwangi memiliki 2 (dua) zona yang berbeda yakni zona untuk para wisatawan yang berkunjung ke pantai dan Zona inti (Kusuma Dewi, 2019). Zona inti merupakan zona yang memiliki lokasi semi alami yang diperuntukan untuk tempat penyu bertelur, yang saat ini telah mencapai luas 4 hektare (Rosalina, 2022). Menurut (Rosalina, 2022), Kelompok Usaha Bersama serta pengelola pantai Cemara telah menyediakan ruang semi permanen yang digunakan untuk penetasan telur penyu sebagai upaya untuk mengantisipasi pencurian telur-telur

penyu. Aktivitas Konservasi penyu di Pantai Cemara telah dilakukan sejak tahun 2013 yang di prakarsai oleh kepala desa dan lurah setempat, serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Banyuwangi (Rosalina, 2022).



Gambar 20. Gambar 13. Zona Pemanfaatan ruang laut sebagai lokasi Cemara dan Konservasi Penyu

(Sumber: (Ali, 2022) dan (Dokumentasi pribadi, 2022))

Selain dijadikan sebagai tempat konservasi penyu, pantai Cemara juga dijadikan sebagai tempat konservasi bagi Cemara udang (*Casuarina equisetifolia*). Tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melakukan penanaman bibit Cemara udang (*Casuarina equisetifolia*) di sepanjang pantai dengan bibit sebanyak 19 ribu (Kusuma Dewi, 2019). Penanaman ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya abrasi pantai serta diharapkan mampu menambah nilai ekonomis masyarakat setempat dengan menjadikan pantai Cemara sebagai tempat wisata. Tarif yang dikenakan untuk masuk kedalam wisata Pantai Cemara ini yaitu sebesar 5 ribu/orang, sedangkan untuk masuk kedalam tempat konservasi penyu dikenakan tarif yang berbeda.

4.2.4.2. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Sebagai kawasan Pariwisata dan Pelabuhan Khusus Berdasarkan RZWP-3-K Prov. Jawa Timur Tahun 2018-2038

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan Pariwisata dan Pelabuhan Khusus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kecamatan Banyuwangi disajikan pada Tabel 21. sebagai berikut:

Table 21. Analisis kesesuaian Pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan Pariwisata dan Pelabuhan Khusus berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi

No.	Pemanfaatan Ruang Laut		Lokasi	Keterangan
	Eksisting	RZWP-3-K		
1	Pariwisata	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Kecil (KKP3K)	Pantai Pulau Santen	Belum Sesuai
2	Pelabuhan Khusus			

(Sumber: Olah Data, 2022)

Berdasarkan hasil tersebut (Tabel?), pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan Pariwisata dan Pelabuhan Khusus di pantai Pulau Santen belum sesuai dengan perencanaan zonasi ruang laut (RZWP-3-K) di Kecamatan Banyuwangi. Adapun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) provinsi Jawa Timur tahun 2018 – 2038 di Kecamatan Banyuwangi tepatnya di kawasan Pantai Pulau Santen yakni sebagai kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil (KKP3K).



Gambar 21. Pulau Santen di Kecamatan Banyuwangi
(Sumber: Dokumentasi, 2022)

Menurut (Kementrian Perhubungan, 2002) dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus, Pelabuhan Khusus Pelabuhan yang dikelola sendiri untuk mendukung kegiatan tertentu. Penyelenggara pelabuhan khusus adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan hukum di Indonesia yang berwenang mengelola pelabuhan khusus. Adapun tujuan dari pengelolaan pelabuhan khusus ini berguna untuk menunjang kegiatan usaha pokok pada bidang tertentu seperti perikanan, pariwisata, dan bidang lain yang membutuhkan fasilitas pelabuhan, serta menunjang berbagai macam kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, dan kegiatan pelatihan serta sosial.

Pemanfaatan ruang laut di Pantai Pulau Santen kecamatan Banyuwangi juga meliputi pengelolaan kawasan sebagai pariwisata. Pariwisata yang berada di Pantai Pulau Santen merupakan destinasi pariwisata pantai syariah. Adapun yang dimaksud pariwisata syariah adalah kawasan wisata yang pengelolaannya tidak melanggar kaidah dalam islam (Wahyuningsih, 2020). Wisata pantai syariah di Pantai Pulau Santen ini merupakan wisata pantai syariah pertama yang ada di Indonesia. Peresmian wisata syariah di Pantai Pulau Santen dilakukan pada bulan Maret tahun 2017. Menurut (Wahyuningsih, 2020), pengelolaan serta pengembangan yang dilakukan di Pantai Pulau Santen menggunakan konsep perbedayaan sosial ekonomi oleh masyarakat, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat setempat. Peresmian kawasan wisata yang dilakukan sebelum tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) provinsi Jawa Timur tahun 2018-2038 menjadi penyebab belum sesuai pamanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana zonasi yang ada.

4.2.4.3. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Sebagai kawasan Pelabuhan Lokal dan Lokasi Penyu Berdasarkan RZWP-3-K Prov. Jawa Timur Tahun 2018-2038

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai lokasi penyu dan pelabuhan lokal berdasarkan rencana zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil di kecamatan Banyuwangi ditampilkan pada Tabel 22. sebagai berikut:

Table 22. Analisis kesesuaian Pemanfaatan ruang laut eksisting sebagai kawasan Pelabuhan Lokal dan Lokasi Penyu berdasarkan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi

No.	Pemanfaatan Ruang Laut		Lokasi	Keterangan
	Eksisting	RZWP-3-K		
1	Lokasi Penyu	Pelabuhan (DLkr DLkp)	Pantai Boom	Sesuai
2	Pelabuhan Lokal			

(Sumber: Olah Data, 2022)

Menurut rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) provinsi Jawa Timur di Kecamatan Banyuwangi, Ruang laut yang berada di perairan pantai Boom Kecamatan Banyuwangi ini diperuntukan sebagai zona DLkr DLkp yakni menjadi kawasan pelabuhan. Berdasarkan analisis kesesuaian yang telah ditampilkan pada (Tabel.22), menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang laut eksisting di pantai Boom sebagai lokasi penyu dan pelabuhan lokal telah sesuai dengan RZWP-3-K yang berlaku. Pantai Boom terletak di salah satu kelurahan di Kecamatan Banyuwangi yakni kelurahan Kampung Mandar.



Gambar 22. Pelabuhan Boom di Pantai Boom Kecamatan Banyuwangi

(Sumber: Dokumentasi, 2022)

Salah satu pemanfaatan ruang laut eksisting yang ada kecamatan Banyuwangi yakni sebagai kawasan pelabuhan lokal. Pembangunan pelabuhan ini dilakukan diatas aset milik PT Pelindo III dan dikelola anak perusahaan PT Pelindo Properti Indonesia pada tahun 2015. Menurut (Suminar, 2020),

Pembangunan pelabuhan yang dilakukan dalam rangka kerja sama bersama badan usaha milik negara (BUMN) ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata. Pantai Boom selain dimanfaatkan sebagai kawasan pelabuhan, juga di manfaatkan sebagai tempat penangkaran penyu yang bertelur di wilayah pantai Boom. Lokasi pantai Boom yang berada di perkotaan membuat telur-telur penyu terancam oleh gangguan. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 dilakukan aksi konservasi melalui relokasi telur-telur penyu ke sarang semi alami yang digagas oleh organisasi Banyuwangi Sea Turtle Foundation (BSTF) (Umama et al., 2020). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka penetasan serta melindungi telur penyu.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul ‘Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Berdasarkan RTRW dan RZWP-3-K di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi’ kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Banyuwangi didapatkan hasil sebagai berikut:

a) Pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi memiliki 8 kelas pemanfaatan yakni Perairan payau 1,05%, Permukiman 45,08%, Pertanian 22,34%, Perkebunan 16,72%, Pelabuhan Yacht 0,60%, Sempandan Pantai 0,68%, Kawasan Tambak 10,43%, serta Tanah Ladang 3,13%. Pemukiman menjadi kelas pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang terluas yakni sebesar 1197 Ha atau 45,08%, sedangkan kelas pemanfaatan ruang wilayah pesisir terkecil yaitu pelabuhan dengan luas 16 Ha atau 0,60%.

b) Pemanfaatan ruang laut eksisting di Kecamatan Banyuwangi terdiri dari 6 (enam) zona pemanfaatan yang berada di 3 (tiga) lokasi pantai. Adapun 6 zona pemanfaatan tersebut adalah Lokasi Cemara dan Konservasi Penyu di Pantai Cemara, Pariwisata dan Pelabuhan Khusus di Pantai Pulau Santen, serta Lokasi Penyu dan Pelabuhan Lokal di Kawasan Pantai Boom.

2. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir seluas 1883 Ha atau 70,9% di Kecamatan Banyuwangi telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032, sedangkan lahan seluas 588 Ha atau 22,1% belum sesuai, dan 185 Ha atau 7% lahan tidak sesuai. Adapun pemanfaatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi 4 (empat) dari 6 (enam) zona pemanfaatan telah sesuai dengan RZWP-3-K provinsi

Jawa Timur Tahun 2018 – 2038, dan 2 (dua) zona pemanfaatan lainnya belum sesuai dengan rencana zonasi yang ada di RZWP-3-K provinsi Jawa Timur Tahun 2018 – 2038.

5.2. Saran

Perlunya penyajian peta pemanfaatan ruang laut pada data pemanfaatan ruang laut eksisting di provinsi Jawa Timur atau lebih tepatnya di Kecamatan Banyuwangi dalam bentuk polygon agar luasan ruang laut yang digunakan dapat diketahui, sehingga pada analisis kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang dilakukan pada penelitian selanjutnya dapat diketahui luasan ruang laut yang telah sesuai dengan rencana zonasi yang telah ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2022). *Ground Check*. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar.
[Http://Bpkh8.Menlhk.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=66&Itemid=80#:~:Text=Pengecekan Lapangan \(Groundcheck\) Merupakan Kegiatan,Sama Di Lapangan Sesuai Karakteristiknya.](http://Bpkh8.Menlhk.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=66&Itemid=80#:~:Text=Pengecekan Lapangan (Groundcheck) Merupakan Kegiatan,Sama Di Lapangan Sesuai Karakteristiknya.)
- Agrafiotis, P., Georgopoulos, A., & Karantzas, K. (2016). The Effect Of Pansharpening Algorithms On The Resulting Orthoimagery. *The International Archives Of The Photogrammetry, Remote Sensing And Spatial Information Sciences*, Xli-B7. <https://doi.org/10.5194/isprsarchives-Xli-B7-625-2016>
- Agung, A., Sigit, A., Putra, P., & Satiawan, R. (2018). Perumusan Faktor- Faktor Perubahan Tol Waru-Juanda Di Kelurahan Tambakoso Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2), 173–179.
- Ali, A. (2022). *Pantai Cemara Pakis Banyuwangi, Hidden Gem Cantik Dengan Sejarah Yang Menarik - Banyuwangi Network*. Banyuwangi Jatim Network.Com. <https://Banyuwangi.Jatimnetwork.Com/Hiburan/Pr-3324824716/Pantai-Cemara-Pakis-Banyuwangi-Hidden-Gem-Cantik-Dengan-Sejarah-Yang-Menarik>
- Asma, N. (2018). *Analisa Perubahan Lahan Tambak Menggunakan Metode Maximum Likelihood (Studi Kasus: Kota Banda Aceh)*.
- Badan Informasi Geospasial. (2014). Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar. *Badan Informasi Geospasial. Bogor*.
- Barkey, R. A., Achmad, A., Rijal, S., Soma, A. S., & Talebe, A. B. (2009). *Buku Ajar Sistem Informasi Geografis Tim : Laboratorium Perencanaan Dan Universitas Hasanuddin*. 1–205.
- BPS Kabupaten Banyuwangi. (2022). <https://Banyuwangikab.Bps.Go.Id/Statictable/2015/01/27/35/Laju-Pertumbuhan->

Penduduk.Html

- Budisanjaya, I. P., & Kunci, K. (2013). Perangkat Lunak Pengolahan Citra Untuk Segmentasi Dan Cropping Daun Sawi Hijau. *Prosiding Conference On Smart-Green Technology In Electrical And Information Systems, November*, 14–15.
- Djunaedi, A., & Basuki, M. N. (2002). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 3, 225–231. <https://ejournal.bppt.go.id/index.php/jtl/article/view/259/159>
- Fitri, L., & Zulfa, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Potensi Pusat Kegiatan Ekonomi Di Kawasan Pesisir Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*, 1(2), 47. <https://doi.org/10.29103/jepu.v1i2.1127>
- Fujiastuti, A., & Pigawati, B. (2014). Evaluasi Penyusunan Norma, Standart Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2010 Asyifa Fujiastuti¹, Bitta Pigawati². *Jurnal Geografi*, 11(1), 14–31.
- Hidayah, Z., & Suharyo, O. S. (2018). Analisa Perubahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Selat Madura. *Rekayasa*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.21107/Rekayasa.V11i1.4120>
- Irnawati, & Sumaryono, M. (2011). *Analisis Fungsi Kawasan Dengan Penerapan Sistem Informasi Geografis Di Wilayah Kota Sorong Provinsi Papua Barat*. 56–67. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/72wn6>
- Jauhariyah, N. A., & Inayah, N. (2016). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Banyuwangi. *Malia*, 8.
- Kecamatan Banyuwangi Dalam Angka 2020*. (2020). BPS Kabupaten Banyuwangi. <https://doi.org/1102001.3510180>
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2016). *Pedoman Teknis Penyusunan Peta Rencana Zonasi WP-3-K Provinsi* (A. K. Pranoto (Ed.); Issue September).
- Kementrian Perhubungan. (2002). *Keputusan Menteri Perhubungan No.55 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus*.

- Kusuma Dewi, A. T. (2019). Potensi Pantai Cemara, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Sebagai Kawasan Ekowisata. *JFMR-Journal Of Fisheries And Marine Research*, 3(3), 351–358. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jfmr.2019.003.03.10>
- Lamusa, A., Program, M., Agribisnis, S., Pertanian, F., Tadulako, U., Program, D., Agribisnis, S., Pertanian, F., & Tadulako, U. (2015). Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian. *E-J. Agrotekbis*, 3(April), 212–221.
- Luthfina, M. A. W., Sudarsono, B., & Suprayogi, A. (2019). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kecamatan Pati. *Jurnal Geodesi Undip*, 8(1), 74–82.
- Nasriaty N. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Katalogis*, 4, 98–108.
- Nilasari, M., Sasmito, B., & Sukmono, A. (2017). Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Memetakan Kekeringan Lahan Pertanian Dengan Metode Thermal Vegetation Index (Studi Kasus : Kabupaten Kudus, Jawa Tengah). *Jurnal Geodesi Undip Juli*, 6(3).
- Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun, 2018. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038* (Vol. 7, Issue 2).
- Perda Nomor 08 Tahun, 2012. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032* (Vol. 5, Issue 1).
- Permen Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri Nomor 1 Tahun 2018.* (2018).
- Pradipta, I. M. D., Widyantara, I. M. O., & Hartati, R. S. (2019). Penajaman Citra Satelit Landsat 8 Menggunakan Transformasi Brovey. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 18(3), 353. <https://doi.org/10.24843/Mite.2019.V18i03.P08>
- Prasarana, D. P. Dan, & Ruang, W. D. J. P. (2003). *Pedomah Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Wilayah Propinsi.* (Busrodin (Ed.); P. 88). PT

Mediatama Saptakarya.

Purwanto. (2017). *Modul Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Purwanto, E. H., Lukiawan, R., Penelitian, P., Standardisasi, P., & Nasional, B. S. (2019). Parameter Teknis Dalam Usulan Standar Pengolahan Penginderaan Jauh: Metode Klasifikasi Terbimbing Technical Parameter On Proposed Of Remote Sensing Processing Data: Supervised Classification. *Jurnal Standardisasi*, 21.

Rosalina, D. (2022). *Upaya Konservasi Penyu Lekang (Lepidochelys Olivacea) Di Wilayah Konservasi Edukasi Mangrove Dan Penyu Pantai Cemara , Banyuwangi , Jawa Timur Turtle Conservation Effort In Cemara Beach Mangrove And*. 14, 1–10.

Sari, R., Anurogo, W., & Lubis, M. Z. (2018). Pemetaan Sebaran Suhu Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Landsat 8 Di Pulau Batam. *Jurnal Integrasi* |, 32(1), 2548–9828. www.Earthexplorer.Usgs.Gov.

Sitepu, I., Prasetyo, Y., & Janu Amarrohman, F. (2017). Analisis Aspek Morfologi Jalan (Layout Of Streets) Kota Semarang Terhadap Pertumbuhan Tata Ruang Dan Wilayah Menggunakan Metode Digitasi Citra Resolusi Tinggi Dan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip Januari*, 6(1).

Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41–60. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>

Sukandar, Harsindhi, C. J., Dewi, C. S. U., Handayani, M., Maulana, A. W., Supriyadi, & Bahroni, A. (2016). *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume II (Selatan Jawa Timur)*. 2, 137.

Suminar, A. (2020). *Banyuwangi Punya Pelabuhan Kapal Pesiar Di Pantai Marina Boom - Suara Surabaya*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/banyuwangi-punya-pelabuhan-kapal-pesiar-di-pantai-marina-boom/>

Suparno. (2009). Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Salah Satu

Dokumen Penting Untuk Disusun Oleh Pemerintah Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota. *Jurnal Mangrove Dan Pesisir*, IX(1), 1–8.

Togatorop, A. C. (2018). *Analisis Tutupan Lahan Kabupaten Pakpak Bharat Menggunakan Citra SAR Sentinel-1*.

Tyalestari, R. (2016). *Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Raden Paku Wringinanom Gresik*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Umama, A. R., Restiadi, T. I., Prastiya, R. A., Safitri, E., Saputro, A. L., Yudhana, A., & Haditanojo, W. (2020). Tingkat Keberhasilan Penetasan Telur Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*) Pada Sarang Semi Alami Di Pantai Boom Banyuwangi Periode Tahun 2018. *Jurnal Medik Veteriner*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.17-24>

Wahyuningsih, N. S. (2020). Persepsi Pengunjung Terhadap Wisata Syariah Pantai Pulau Santen Di Banyuwangi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah*.

Woltjer, J. (2014). Kesesuaian Lahan Permukiman Di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 1–16.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A